

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. ¹FORMAT NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG DICANTUMKAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst		

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

B. SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH, SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH, REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH DAN REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

1. FORMAT SURAT PENAGIHAN PIUTANG

KABUPATEN BOYOLALI
SURAT PENAGIHAN PIUTANG

№
Nomor : a) , tanggal

Berdasarkan

.....
.....
diminta segera untuk membayar kepada :
KAS DAERAH/BANK (Rekening Nomor)
uang sejumlah Rp..... (.....)
untuk
.....
.....

Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

a.n. BUPATI BOYOLALI
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Kepada :
.....
.....

Tembusan : Kuasa Bendahara Umum Daerah

2. FORMAT SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI
SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

Nomor : , tanggal

Berdasarkan
diminta mulai setiap bulan membayar kepada :
KAS DAERAH/ BANK (Rekening Nomor)
uang sejumlah Rp..... (.....)
untuk)
.....

sehingga jumlah penagihan sebesar Rp (.....)
lunas.

Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

a.n. BUPATI BOYOLALI
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Kepada :
.....
.....

Tembusan : Kuasa Bendahara Umum Daerah

3. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI
REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG

Tahun Anggaran : _____

Halaman : _____

Nomor Urut	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang Berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	Penyetoran menurut Buku Kas			Keterangan
						Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah						

- 4 -

....., tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama jelas)

NIP

4. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI
REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

Tahun Anggaran :

Halaman :

Nomor Urut	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang Berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Pemungutan			Kode Rekening	Penyetoran Menurut Buku Kas			Ket
					Mulai Tanggal	Bulan, Triwulan, Semester, Tahunan	Jumlah (Rp)		Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
			Jumlah			Jumlah				Jumlah		

....., tanggal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama jelas)

NIP.

C. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 DAN ORGANISASI

KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1			2
1.			URUSAN WAJIB
1.	01.		PENDIDIKAN
1.	01.	01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.	01.	02.	dst.....
1.	02.		KESEHATAN
1.	02.	01.	Dinas Kesehatan
1.	02.	02.	Rumah Sakit Umum Daerah
1.	02.	03.	dst.....
1.	03.		PEKERJAAN UMUM
1.	03.	01.	Dinas Pekerjaan Umum
1.	03.	02.	dst.....
1.	06.		PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.	06.	01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.	06.	02.	dst.....
1.	20.	14.	Kecamatan Pulau Laut
2.	03.	02.	dst.....

D. KODE AKUN PENDAPATAN, KODE AKUN BELANJA, DAN KODE AKUN PEMBIAYAAN

SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

KODE	URAIAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan LRA
5	Belanja
6	Pembiayaan

E. KODE REKENING PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
4	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.	Pajak Hotel
4.1.1.01.01.	Hotel bintang lima berlian
4.1.1.01.02.	Hotel bintang lima
4.1.1.01.03.	Hotel bintang empat
4.1.1.01.04.	Hotel bintang tiga
4.1.1.01.05.	Hotel bintang dua
4.1.1.01.06.	Hotel bintang satu
4.1.1.01.07.	Hotel melati tiga
4.1.1.01.08.	Hotel melati dua
4.1.1.01.09.	Hotel melati satu
	dst

F. KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI

KODE	FUNGSI
01.	Pelayanan umum
02.	Pertahanan *)
03.	Ketertiban dan keamanan
04.	Ekonomi
05.	Lingkungan hidup
06.	Perumahan dan fasilitas umum
07.	Kesehatan
08.	Pariwisata dan budaya
09.	Agama *)
10.	Pendidikan
11.	Perlindungan sosial

Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat

G. KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI

KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI
UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE			URAIAN
1			2
01			Pelayanan umum
01	1	06	Perencanaan Pembangunan
01	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
01	1	23	Statistik
01	1	24	Kearsipan
01	1	25	Komunikasi dan Informatika
02			Pertahanan*)
03			Ketertiban dan ketentraman
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
04			Ekonomi
04	1	07	Perhubungan
04	1	14	Tenaga Kerja
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04	1	16	Penanaman Modal
04	1	21	Ketahanan Pangan
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04	2	01	Pertanian
04	2	02	Kehutanan
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral
04	2	05	Kelautan dan Perikanan
04	2	06	Perdagangan
04	2	07	Perindustrian
04	2	08	Transmigrasi
05			Lingkungan hidup
05	1	05	Penataan Ruang
05	1	08	Lingkungan Hidup
05	1	09	Pertanahan
06			Perumahan dan fasilitas umum
06	1	03	Pekerjaan Umum
06	1	04	Perumahan Rakyat
07			Kesehatan
06	1	02	Kesehatan
06	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08			Pariwisata dan budaya
07	1	17	Kebudayaan
07	2	04	Pariwisata

KODE			URAIAN
1			2
09			Agama*)
10			Pendidikan
10	1	01	Pendidikan
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga
10	1	26	Perpustakaan
11			Perlindungan sosial
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan
11	1	13	Sosial

Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat

H. KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. KODE DAN DAFTAR PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KODE DAN DAFTAR PROGRAM MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

KODE	PROGRAM
1	2
1	URUSAN WAJIB
1.01.	PENDIDIKAN
1.01.04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
1.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.17.	Program Pendidikan Menengah
1.01.18.	Program Pendidikan Non Formal
1.01.19.	Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.23.	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
1.01.24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.01.25.	Dst.....
1.02.	KESEHATAN
1.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1.02.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

KODE	PROGRAM
1	2
1.02.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02.34	Dst.....
1.03.	PEKERJAAN UMUM
1.03.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.17.	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
1.03.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.19.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
1.03.20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.21.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1.03.22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
1.03.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.26.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.28.	Program Pengendalian Banjir
1.03.29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03.31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03.32.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.03.33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.03.34.	Dst.....
1.04.	PERUMAHAN
1.04.15.	Program Pengembangan Perumahan
1.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1.04.18.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1.04.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.20.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.04.21.	Dst.....
1.05.	PENATAAN RUANG
1.05.15.	Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.16.	Program Pemanfaatan Ruang
1.05.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.18.	Dst.....
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.16.	Program Kerjasama Pembangunan
1.06.17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.06.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.19.	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar
1.06.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

KODE	PROGRAM
1	2
	Pembangunan Daerah
1.06.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.25.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1.06.26.	Dst.....
1.07.	PERHUBUNGAN
1.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.19.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Antar Desa di Daerah Tertinggal
1.07.20.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Rawa/Sungai Antar Desa di Daerah Tertinggal
1.07.21.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal
1.07.22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.23.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.24.	Program Keselamatan Pelayaran
1.07.25.	Dst.....
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP
1.08.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
1.08.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.08.21.	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
1.08.22.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
1.08.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.08.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08.25.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.08.26.	Dst.....
1.09.	PERTANAHAN
1.09.15.	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1.09.16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.17.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1.09.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.09.19.	Dst.....
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.26.	Dst.....

KODE	PROGRAM
1	2
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.11.19.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.20.	Dst.....
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.15.	Program Keluarga Berencana
1.12.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi
1.12.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1.12.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.12.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1.12.22.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12.23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1.12.24.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.12.25.	Dst.....
1.13.	SOSIAL
1.13.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.17.	Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.18.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.13.19.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1.13.20.	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.22.	Dst.....
1.14.	KETENAGAKERJAAN
1.14.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.18.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.19.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1.14.20.	Dst.....
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1.15.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

KODE	PROGRAM
1	2
	Kecil Menengah
1.15.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.19.	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
1.15.20.	Dst.....
1.16.	PENANAMAN MODAL
1.16.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.17.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1.16.18.	Dst.....
1.17.	KEBUDAYAAN
1.17.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.18.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.18.19.	Dst.....
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.18.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.17.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1.18.18.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1.18.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.18.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
1.18.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.22.	Dst.....
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.18.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
1.19.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.22.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.23.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.19.24.	Dst.....
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.07.	Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

KODE	PROGRAM
1	2
1.20.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.18.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.22.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.24.	Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.28.	Program Pendidikan Kedinasan
1.20.29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.30.	Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
1.20.31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
1.20.32.	Dst.....
1.21.	KETAHANAN PANGAN
1.21.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.21.26.	Dst.....
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
1.22.20.	Program Pembinaan Otonomi Desa
1.22.21.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan
1.22.22.	Program Penanggulangan Kemiskinan
1.22.23.	Dst.....
1.23.	STATISTIK
1.23.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23.16.	Dst.....
1.24.	KEARSIPAN
1.24.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.24.17.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.24.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.24.19.	Dst.....
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	PROGRAM
1	2
1.25.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.16.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1.25.17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1.25.19.	Dst.....
1.26.	PERPUSTAKAAN
1.26.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.16.	Dst.....
2.	URUSAN PILIHAN
2.01.	PERTANIAN
2.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.16.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.18.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01.22.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.01.23.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.01.24.	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
2.01.25.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.01.26.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
2.01.27.	Peningkatan Ketahanan Pangan
2.01.28.	Dst.....
2.02.	KEHUTANAN
2.02.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.02.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.02.18.	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
2.02.19.	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
2.02.20.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2.02.21.	Program Penataan dan Pemantapan Status Kawasan Hutan
2.02.22.	Program Pengamanan dan Pengendalian Satwa Liar yang di Lindungi
2.02.23.	Program Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
2.02.24.	Dst.....
2.03.	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.16.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
2.03.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.18.	Program Pengembangan Bidang Pertambangan Umum
2.03.19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Minyak dan Gas
2.03.20.	Dst.....
2.04.	PARIWISATA
2.04.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

KODE	PROGRAM
1	2
2.04.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.17.	Program Pengembangan Kemitraan
2.04.18.	Program Pengembangan Nilai Sejarah dan Budaya
2.04.19.	Dst.....
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05.17.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2.05.18.	Program Peningkatan Mitigasi bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut
2.05.19.	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
2.05.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.22.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
2.05.23.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.24.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05.25.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal Komoditas Unggulan
2.05.26.	Program Pengawasan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.27.	Program Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.28.	Program Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.05.29.	Pengembangan Data Informasi
2.05.30.	Dst.....
2.06.	PERDAGANGAN
2.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.19.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.06.20.	Program Pembangunan Tempat Usaha/Dagang
2.06.21.	Dst.....
2.07.	INDUSTRI
2.07.15.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.18.	Program Penataan Struktur Industri
2.07.19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2.07.20.	Dst.....
2.08.	TRANSMIGRASI
2.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.08.16.	Program Transmigrasi Lokal
2.08.17.	Program Transmigrasi Regional
2.08.18.	Dst.....

2. KODE DAN DAFTAR KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KODE DAN DAFTAR KEGIATAN MENURUT SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01.06.	Penyediaan jasa peralatan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
01.21.	Penyediaan jasa akomodasi tamu
01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan
01.24.	Penyediaan jasa keamanan kantor
01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan
01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan
01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi
01.28.	Penyusunan standard operasional prosedur (SOP)
01.29.	Penyusunan standard pelayanan minimal (SPM)
01.30.	Penyediaan jasa protocol
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi
01.32.	Apel besar HUT RI
01.33.	Operasional UPTD pertanian
01.34.	dst.....
0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
02.01.	Pembangunan rumah jabatan
02.02.	Pembangunan rumah dinas
02.03.	Pembangunan gedung kantor
02.04.	Pengadaan mobil jabatan
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor
02.10.	Pengadaan mebeleur
02.11.	Pengadaan peralatan kerja
02.12.	Pengadaan alat studio
02.13.	Pengadaan alat komunikasi
02.14.	Pengadaan pemasangan jaringan telephone
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor
02.17.	Pembangunan tempat parkir dan halaman kantor
02.18.	Pengadaan sistem arsip digital
02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
02.31.	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
02.32.	Pemeliharaan rutin/berkala studio
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan
02.35.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi
02.37.	Pemeliharaan server, client dan aplikasi jaringan
02.40.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
02.41.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
02.43.	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02.44.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
02.45.	Pembangunan gedung pertemuan
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran
02.47.	Pengadaan/pembelian gedung kantor/mess
02.48.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
02.49.	Penyediaan sistem komputerisasi
02.50.	dst.....
0.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
03.06.	Pemuktahiran tanda pengenal PNS
03.07.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi kehadiran pegawai
03.08.	Updating aplikasi sistem kepegawaian (SIMPEG)
03.09.	dst.....
0.4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
04.01.	Pemulangan pegawai yang pension
04.02.	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
04.03.	Pemindahan tugas PNS
04.04.	Pemberian penghargaan bagi PNS purna bakti dan PNS wafat
04.05.	dst.....
0.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal
05.02.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
05.05.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dan non aparatur
05.06.	Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah
05.07.	Pembekalan pelaksanaan kegiatan APBD
05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan/kearsipan
05.09.	Pelatihan dan pembinaan tenaga satpol PP
05.10.	Peningkatan kapasitas aparatur perencana
05.11.	Pendidikan dan pelatihan fungsional
05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)
05.13.	Bimbingan teknis administrasi persuratan dan kearsipan daerah
05.14.	Bimbingan teknis pengenalan jaringan LAN database
05.15.	Pengiriman peserta diklat kepemimpinan tingkat II dan III
05.16.	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV
05.17.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil daerah
05.18.	Pelatihan juru bicara pemerintah daerah
05.19.	Pelatihan/orientasi pegawai tidak tetap (PTT)
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur
05.21.	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa
05.22.	Sosialisasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
05.23.	Bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
05.24.	Pelatihan dan pengembangan bahasa inggris bagi pejabat

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	eselon
05.25.	Sosialisasi analisis beban kerja
05.26.	Sosialisasi kelembagaan (job description) pada dinas/badan/bagian
05.27.	Sosialisasi tata naskah dinas
05.28.	Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
05.29.	Pembinaan dan penyuluhan hukum aparatur pemerintah
05.30.	Bimbingan teknis pejabat pelaksana teknis kegiatan
05.31.	Bimbingan teknis penyusunan dokumen kontrak
05.32.	Pendidikan dan pelatihan angka kredit tenaga fungsional kesehatan
05.33.	Pelatihan manajemen pemerintahan desa
05.34.	Sosialisasi pokok-pokok kepegawaian
05.35.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan
05.36.	Diklat pembekalan PKP-PK bandar udara
05.37.	Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)
05.38.	Bimbingan teknis analisis jabatan dan beban kerja
05.39.	Tes diklat kepemimpinan tingkat III dan IV
05.40.	Ujian kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes)
05.41.	Pembinaan camat sebagai pengawas umum pembangunan
05.42.	Diklat penatausahaan pengeluaran keuangan daerah
05.43.	Pelatihan fotografer
05.44.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa
05.45.	Rapat kerja operator radio dan data elektronik
05.46.	Bimbingan teknis protokol pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah
05.47.	Pendidikan dan pelatihan penanggulangan penyelamatan kebakaran di bandara
05.48.	Bimbingan teknis evaluasi jasa konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya
05.49.	Diklat dan kursus widyaiswara dan tenaga kediklatan
05.50.	Rapat koordinasi, sinkronisasi dan asistensi penyelenggaraan diklat
05.51.	Diklat tenaga kearsipan
05.52.	Sosialisasi dan loklatih penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di daerah
05.53.	Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan
05.54.	Diklat beladiri praja wibawa
05.55.	Pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan
05.56.	Kegiatan teknis penanggulangan bencana kebakaran di Bandar Udara Boyolali
05.57.	Pendidikan dan pelatihan fire rescue
05.58.	Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
05.59.	Bimbingan teknis peraturan kepegawaian
05.60.	Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
05.61.	dst.....

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
0.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
06.03.	Penyusunan pelaporan pragnosis realisasi anggaran
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06.05.	Pembuatan sistem akuntansi keuangan SKPD
06.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
06.07.	Penyusunan RENSTRA
06.08.	dst.....
0.7	Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial Masyarakat
07.01.	Kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
07.02.	Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ tingkat provinsi
07.03.	Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
07.04.	Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan social
07.05.	Penyelenggaraan STQ tingkat kabupaten
07.06.	Pembinaan dan pengiriman peserta STQ tingkat provinsi
07.07.	Pelatihan ustadz-ustadzah TPQ kabupaten
07.08.	Bimbingan emotional sosial quation (ESQ)
07.09.	Pelatihan dewan hakim
07.10.	Pelatihan imam khatif dan muballigh muballighoh
07.11.	Pembinaan sosial masyarakat dan safari ramadhan
07.12.	dst.....
08.	Dst.....
s.d	
14.	Dst.....

3. KODE DAN DAFTAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN
KODE DAN DAFTAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.	PENDIDIKAN
1.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.01.	Pembangunan gedung sekolah
1.01.15.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.15.04.	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.15.05.	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.15.06.	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.01.15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01.15.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
1.01.15.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.11.	Pembangunan ruang ibadah
1.01.15.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.15.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.15.17.	Pengadaan pakaian olah raga
1.01.15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah
1.01.15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.15.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.15.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.15.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.15.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.15.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.15.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.15.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.01.15.29.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1.01.15.30.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.15.31.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.15.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.33.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.15.34.	Pemeliharaan rutin.berkala ruang perpustakaan sekolah
1.01.15.35.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.36.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.37.	Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.15.38.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah
1.01.15.39.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.15.40.	Pemeliharaan rutin berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.15.41.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.15.42.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.15.43.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.44.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.15.46.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.15.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.15.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olah raga
1.01.15.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
1.01.15.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.15.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.15.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.53.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.15.54.	Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan sekolah
1.01.15.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini
1.01.15.59.	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.15.60.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
1.01.15.61.	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
1.01.15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1.01.15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini
1.01.15.64.	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini
1.01.15.65.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1.01.15.66.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK
1.01.15.68.	dst.....
1.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.16.01.	Pembangunan gedung sekolah
1.01.16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.16.04.	Penambahan ruang guru sekolah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.16.06.	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.16.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.01.16.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.11.	Pembangunan ruang ibadah
1.01.16.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.16.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.16.17.	Pengadaan pakaian olahraga
1.01.16.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.16.19.	Pengadaan mebeleur sekolah
1.01.16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.16.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.16.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.16.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.16.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.16.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.16.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.16.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana sekolah
1.01.16.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.16.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.16.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.16.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.16.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01.16.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.16.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah
1.01.16.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.16.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.16.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah
1.01.16.42.	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.43.	Pemeliharaan sedang/berat asrama siswa
1.01.16.44.	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.16.45.	Pemeliharaan sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.16.46.	Pemeliharaan sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
1.01.16.47.	Pemeliharaan sedang/berat sarana mobilitas sekolah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.16.48.	Pemeliharaan sedang/berat ruang locker siswa
1.01.16.49.	Pemeliharaan sedang/berat sarana olah raga
1.01.16.50.	Pemeliharaan sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.16.51.	Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.52.	Pemeliharaan sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.53.	Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah
1.01.16.54.	Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.16.55.	Pemeliharaan sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.16.56.	Pemeliharaan sedan/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.16.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.16.58.	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1.01.16.59.	Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01.16.60.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01.16.61.	Pembinaan SMP terbuka
1.01.16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB
1.01.16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP
1.01.16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP
1.01.16.65.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01.16.66.	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1.01.16.67.	Penyelenggaraan paket A setara SD
1.01.16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP
1.01.16.69.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
1.01.16.70.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01.16.71.	Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
1.01.16.72.	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01.16.73.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.01.16.74.	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1.01.16.75.	Penyediaan beasiswa transisi
1.01.16.76.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01.16.77.	Penyelenggaraan multi-grade teaching di daerah terpencil
1.01.16.78.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.01.16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar
1.01.16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar
1.01.16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)
1.01.16.82.	Pelaksanaan try out ujian nasional pendidikan dasar
1.01.16.83.	Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP
1.01.16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	pertama
1.01.16.85.	Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama
1.01.16.86.	Rapat koordinasi bidang pendidikan dasar
1.01.16.87.	Ujian nasional dan UASBN SD/SMP
1.01.16.88.	Pengukuran pelayanan publik
1.01.16.89.	dst.....
1.01.17.	Program Pendidikan Menengah
1.01.17.01.	Pembangunan gedung sekolah
1.01.17.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.17.04.	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)
1.01.17.06.	Pembangunan locker siswa
1.01.17.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.01.17.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.17.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
1.01.17.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.11.	Pembangunan ruang ibadah
1.01.17.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.17.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.17.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.17.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.17.17.	Pengadaan pakaian olahraga
1.01.17.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.17.19.	Pengadaan mebeleur sekolah
1.01.17.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.17.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.17.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.17.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.17.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.17.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.17.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.17.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.01.17.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.17.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
1.01.17.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.17.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.17.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.17.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.17.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah
1.01.17.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.17.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.17.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.17.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.17.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.17.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.17.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.17.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.17.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.17.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1.01.17.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.17.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasillitas parkir
1.01.17.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.17.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.17.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.17.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1.01.17.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.17.58.	Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01.17.59.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01.17.60.	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan
1.01.17.61.	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1.01.17.62.	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.01.17.63.	Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01.17.64.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
1.01.17.65.	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01.17.66.	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1.01.17.67.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01.17.68.	Penyelenggaraan akredetasi sekolah menengah
1.01.17.69.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.01.17.70.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat menengah
1.01.17.71.	Olimpiade sains nasional (OSN) tingkat menengah
1.01.17.72.	Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK)
1.01.17.73.	Debat bahasa asing tingkat menengah
1.01.17.74.	Lomba cerdas cermat tingkat menengah
1.01.17.75.	Pelaksanaan try out ujian nasional tingkat menengah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.17.76.	Penyediaan bantuan operasional sekolah SMA
1.01.17.77.	Ujian nasional dan UASBN Tingkat SLTA
1.01.17.78.	Pengiriman atlet pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)
1.01.17.79.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SMA
1.01.17.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat menengah
1.01.17.81.	Pengiriman siswa ke luar negeri
1.01.17.82.	Pembangunan asrama siswa
1.01.17.83.	dst.....
1.01.18.	Program Pendidikan Non Formal
1.01.18.01.	Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal
1.01.18.02.	Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal
1.01.18.03.	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01.18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01.18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal
1.01.18.07.	Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal
1.01.18.08.	Pengembangan kebijakan pendidikan nonformal
1.01.18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan nonformal
1.01.18.10.	Pengembangan sertifikasi pendidikan nonformal
1.01.18.11.	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan nonformal
1.01.18.12.	Publikasi sosialisasi pendidikan nonformal
1.01.18.13.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.01.18.14.	Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C
1.01.18.15.	Workshop pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
1.01.18.16.	dst.....
1.01.19.	Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.19.01.	dst.....
1.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.20.02.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.03.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01.20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1.01.20.05.	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
1.01.20.06.	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPP-G)
1.01.20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1.01.20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.09.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan
1.01.20.10.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.20.11.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.12.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.01.20.13.	Pelaksanaan rapat kerja UPTD pendidikan
1.01.20.14.	Diklat kompetensi kepala sekolah
1.01.20.15.	Diklat pembuatan karya tulis ilmiah
1.01.20.16.	Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha
1.01.20.17.	Diklat kompetensi pengawas sekolah
1.01.20.18.	Pelatihan administrasi keuangan sekolah
1.01.20.19.	Sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA
1.01.20.20.	Operasional UPTD pendidikan
1.01.20.21.	Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA
1.01.20.22.	Seleksi dan pengiriman pendidikan guru eksakta
1.01.20.23.	Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan
1.01.20.24.	Bimbingan teknis KTSP tingkat SLTA
1.01.20.25.	Pelaksanaan rapat kordinasi guru bidang studi tingkat SLTA
1.01.20.26.	Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA
1.01.20.27.	Validasi dan evaluasi pelaksanaan KTSP
1.01.20.28.	Validasi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.29.	Bimbingan teknis pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru
1.01.20.30.	Sertifikasi dan penyusunan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru
1.01.20.31.	Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi salah bilik (mismatch)
1.01.20.32.	Peningkatan kualifikasi guru D-II/III ke strata 1 (akselerasi)
1.01.20.33.	Pembinaan pelaksanaan KKKS sekolah dasar
1.01.20.34.	Ujian nasional dan UASBN
1.01.20.35.	Pelatihan tematik guru (SD/MI)
1.01.20.36.	Pelatihan bidang studi IPA Terpadu tingkat SLTP
1.01.20.37.	Sosialisasi penyaluran dan penggunaan dana BAGUS, BROS, BOS
1.01.20.38.	Diklat calon kepala sekolah tingkat SLTP/SLTA
1.01.20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
1.01.20.40.	Validasi data pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.41.	Bimbingan teknis induksi guru pembimbing
1.01.20.42.	Olimpiade sains nasional guru matematika dan fisika SLTA
1.01.20.43.	Lomba kepala sekolah berprestasi tingkat TK, SD, SLTP, SM/MA dan SMK
1.01.20.44.	Diklat calon kepala sekolah tingkat SD
1.01.20.45.	Bimbingan teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
1.01.20.46.	Sosialisasi jabatan fungsional guru serta petunjuk pelaksanaannya
1.01.20.47.	Diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA
1.01.20.48.	Diklat dan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar
1.01.20.49.	Pelatihan Guru Bidang Studi UN Tingkat SLTP
1.01.20.50.	Pelatihan Guru Bidang Studi UN Tingkat SLTA
1.01.20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP
1.01.20.52.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.20.53.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
1.01.20.54.	Diklat implementasi kurikulum bagi kepala sekolah SD/MI
1.01.20.55.	Diklat implementasi kurikulum bagi kepala sekolah SLTP/SLTA dan Pengawas
1.01.20.56.	Diklat penilaian kinerja guru TK/SD
1.01.20.57.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
1.01.20.58.	Pelatihan guru bidang studi matematika tingkat SLTP
1.01.20.59.	Pelatihan guru bidang studi matematika tingkat SLTA
1.01.20.60.	Kursus mahir dasar (KMD) pramuka
1.01.20.61.	dst.....
1.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01.21.01.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.01.21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca
1.01.21.03.	Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat
1.01.21.04.	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.01.21.05.	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1.01.21.06.	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1.01.21.07.	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1.01.21.08.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.01.21.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.01.21.10.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.01.21.11.	Pembangunan/peningkatan fasilitas perpustakaan
1.01.21.12.	dst.....
1.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01.22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01.22.03.	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1.01.22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1.01.22.05.	Pembinaan dewan pendidikan
1.01.22.06.	Pembinaan komite sekolah
1.01.22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01.22.08.	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01.22.09.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan pelayanan pendidikan
1.01.22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan
1.01.22.11.	Penyusunan profil pendidikan
1.01.22.12.	Publikasi dan informasi kependidikan
1.01.22.13.	Fasilitasi pengiriman barang dinas pendidikan
1.01.22.14.	Studi pengembangan model pendidikan daerah perbatasan
1.01.22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah
1.01.22.16.	Sosialisasi DAK

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.01.22.17.	Sosialisasi MOU antara Kepolisian Negara RI dengan PGRI
1.01.22.18.	dst.....
1.01.23.	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
1.01.23.01.	Pembangunan asrama mahasiswa
1.01.23.02.	Penyediaan asrama mahasiswa
1.01.23.03.	dst.....
1.01.24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.01.24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibraka
1.01.24.02.	Akreditasi sekolah
1.01.24.03.	Malam apresiasi pendidikan
1.01.24.04.	Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru
1.01.24.05.	Pelaksanaan try out ujian nasional tingkat menengah
1.01.24.06.	dst.....
1.02.	KESEHATAN
1.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.15.02.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.15.03.	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1.02.15.04.	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02.15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.15.07.	dst.....
1.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.16.01.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
1.02.16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02.16.04.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
1.02.16.05.	Perbaikan gizi masyarakat
1.02.16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan
1.02.16.07.	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02.16.08.	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1.02.16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.16.10.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1.02.16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.16.12.	Penyediaan biaya operasional puskesmas
1.02.16.13.	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02.16.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.16.15.	Penyediaan kebutuhan darah
1.02.16.16.	Pelatihan siaga bencana
1.02.16.17.	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.16.18.	Penggunaan Dana kapitasi JKN Puskesmas

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.02.16.19.	dst.....
1.02.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.17.01.	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02.17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.17.03.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1.02.17.04.	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1.02.17.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.17.06.	dst.....
1.02.18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.02.18.01.	Fasilitas pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
1.02.18.02.	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
1.02.18.03.	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
1.02.18.04.	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
1.02.18.05.	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
1.02.18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.18.07.	dst.....
1.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.19.03.	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02.19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02.19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.19.06.	Kemitraan promosi kesehatan
1.02.19.06.	dst.....
1.02.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.20.01.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02.20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02.20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02.20.05.	Penanggulangan gizi lebih
1.02.20.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.20.07.	Pelaksanaan lomba balita sehat indonesia (LBSI)
1.02.20.08.	dst.....
1.02.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02.21.02.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02.21.03.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.21.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.02.21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus
1.02.21.07.	dst.....
1.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.22.02.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1.02.22.03.	Pengadaan vaksin penyakit menular
1.02.22.04.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.22.06.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1.02.22.07.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
1.02.22.08.	Peningkatan imunisasi
1.02.22.09.	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02.22.10.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02.22.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB
1.02.22.13.	Pelayanan kesehatan haji
1.02.22.14.	dst.....
1.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.23.01.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02.23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02.23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.23.04.	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
1.02.23.05.	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02.23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan
1.02.23.07.	dst.....
1.02.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.24.01.	Pelayanan operasi katarak
1.02.24.02.	Pelayanan kesehatan THT
1.02.24.03.	Pelayanan operasi bibir sumbing
1.02.24.04.	Pelayanan sunatan masal
1.02.24.05.	Penanggulangan ISPA
1.02.24.06.	Penanggulangan penyakit cacangan
1.02.24.07.	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
1.02.24.08.	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
1.02.24.09.	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
1.02.24.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.24.11.	dst.....
1.02.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.25.01.	Pembangunan puskesmas
1.02.25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu
1.02.25.03.	Pembangunan puskesmas perairan
1.02.25.04.	Pembangunan puskesmas keliling

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.02.25.05.	Pembangunan posyandu
1.02.25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02.25.07.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02.25.08.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02.25.09.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02.25.10.	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1.02.25.11.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1.02.25.12.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi rawat inap
1.02.25.13.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1.02.25.14.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02.25.15.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02.25.16.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02.25.17.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02.25.18.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas posyandu
1.02.25.19.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02.25.20.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1.02.25.21.	Pembangunan rumah dinas dokter/perawat/bidan
1.02.25.22.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.25.23.	dst.....
1.02.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.02.26.01.	Pembangunan rumah sakit
1.02.26.02.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
1.02.26.03.	Pembangunan gudang obat/apotek
1.02.26.04.	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, kelas I, II, dan III)
1.02.26.05.	Pengembangan ruang rawat darurat
1.02.26.06.	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
1.02.26.07.	Pengembangan ruang operasi
1.02.26.08.	Pengembangan ruang terapi
1.02.26.09.	Pengembangan ruang isolasi
1.02.26.10.	Pengembangan ruang bersalin
1.02.26.11.	Pengembangan ruang inkubator
1.02.26.12.	Pengembangan ruang bayi
1.02.26.13.	Pengembangan ruang rontgen
1.02.26.14.	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1.02.26.15.	Pembangunan kamar jenazah
1.02.26.16.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.26.17.	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.02.26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.26.19.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.26.20.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02.26.21.	Pengadaan mebeleur rumah sakit
1.02.26.22.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)
1.02.26.23.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02.26.24.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02.26.25.	Pengembangan tipe rumah sakit
1.02.26.26.	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit
1.02.26.27.	Pengadaan/pengembangan/renovasi ruang unit transfusi darah (UTD)/bank darah rumah sakit
1.02.26.28.	Pengadaan peralatan medis UTD
1.02.26.29.	Pengadaan peralatan medis UGD
1.02.26.30.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.26.31.	dst.....
1.02.27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.27.02.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1.02.27.03.	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotek
1.02.27.04.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02.27.05.	pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1.02.27.06.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
1.02.27.07.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1.02.27.08.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1.02.27.09.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
1.02.27.10.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1.02.27.11.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1.02.27.12.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1.02.27.13.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1.02.27.14.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1.02.27.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1.02.27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.27.18.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1.02.27.19.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
1.02.27.20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02.27.21.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.27.22.	dst.....
1.02.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.28.01.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02.28.02.	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1.02.28.03.	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1.02.28.04.	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
1.02.28.05.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.02.28.06.	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.02.28.07.	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.02.28.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.28.09.	dst.....
1.02.29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02.29.01.	Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02.29.02.	Imunisasi bagi anak balita
1.02.29.03.	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1.02.29.04.	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita
1.02.29.05.	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawat anak balita
1.02.29.06.	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
1.02.29.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.29.08.	dst.....
1.02.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02.30.02.	Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
1.02.30.03.	Pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan
1.02.30.04.	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
1.02.30.05.	Pembangunan panti asuhan
1.02.30.06.	Pelayanan kesehatan
1.02.30.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.30.08.	dst.....
1.02.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1.02.31.01.	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1.02.31.02.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.02.31.03.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan restaurant
1.02.31.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.31.05.	dst.....
1.02.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.32.01.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02.32.02.	perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
1.02.32.03.	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
1.02.32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
1.02.32.05.	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun
1.02.32.06.	Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
1.02.32.07.	dst.....
1.02.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02.33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan
1.03.	PEKERJAAN UMUM
1.03.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.15.01.	Perencanaan pembangunan jalan
1.03.15.02.	Survei kontur jalan dan jembatan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.03.15.03.	Pembangunan jalan
1.03.15.04.	Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.15.05.	Pembangunan jembatan
1.03.15.06.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.03.15.07.	Pembangunan jalan lapis hotmix
1.03.15.09.	Pembangunan jalan tanah
1.03.15.11.	Pembangunan jalan beton
1.03.15.12.	Pembangunan jalan lapis penetrasi
1.03.15.13.	Peningkatan jalan soil stabilization
1.03.15.14.	dst.....
1.03.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.02.	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.16.05.	Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.06.	dst.....
1.03.17.	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
1.03.17.01.	Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03.17.02.	Survei kemiringan lereng turap/bronjong
1.03.17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.17.04.	dst.....
1.03.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.18.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.18.02.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.18.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.18.06.	dst.....
1.03.19.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
1.03.19.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.03.19.02.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.03.19.03.	dst.....
1.03.20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.20.01.	Inspeksi kondisi jalan
1.03.20.02.	Inspeksi kondisi jembatan
1.03.20.03.	Evaluasi dan pelaporan
1.03.20.04.	dst.....
1.03.21.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1.03.21.01.	Rehabilitasi jalan dalam kondidi tanggap darurat
1.03.21.02.	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1.03.21.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.21.04.	dst.....
1.03.22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
1.03.22.01.	Penyusunan sistem informasi database jalan
1.03.22.02.	Penyusunan sistem informasi database jembatan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.03.22.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.22.04.	dst.....
1.03.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.23.01.	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03.23.02.	Pembangunan gedung workshop
1.03.23.03.	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.04.	Pengadaan alat-alat berat
1.03.23.05.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.23.06.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03.23.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1.03.23.09.	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.23.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.23.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.23.14.	dst.....
1.03.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.24.01.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03.24.02.	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.03.	Perencanaan pembangunan reservoir
1.03.24.04.	Perencanaan pembangunan pintu air
1.03.24.05.	Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.06.	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.07.	Pembangunan reservoir
1.03.24.08.	Pembangunan pintu air
1.03.24.09.	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.24.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1.03.24.13.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03.24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.15.	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03.24.16.	Pemberdayaan petani pemakai air
1.03.24.17.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.24.18.	Pembangunan jaringan irigasi
1.03.24.19.	dst.....
1.03.25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.25.01.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.02.	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.03.	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.04.	Pembangunan sumur-sumur air tanah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.03.25.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1.03.25.06.	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
1.03.25.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.25.08.	dst.....
1.03.26.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.26.01.	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.26.02.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.26.03.	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
1.03.26.04.	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
1.03.26.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.03.26.06.	Peningkatan konservasi air tanah
1.03.26.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.26.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03.26.09.	dst.....
1.03.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.27.01.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.03.27.02.	Penyediaan prasarana dan sarana air bersih
1.03.27.03.	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
1.03.27.04.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah
1.03.27.05.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
1.03.27.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03.27.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
1.03.27.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
1.03.27.09.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.03.27.10.	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih / air minum
1.03.27.11.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2)
1.03.27.12.	dst.....
1.03.28.	Program Pengendalian Banjir
1.03.28.01.	Pembangunan reservoir pengendali banjir
1.03.28.02.	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1.03.28.03.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03.28.04.	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
1.03.28.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1.03.28.06.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1.03.28.07.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03.28.08.	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir
1.03.28.09.	Pembangunan prasarana pengaman pantai

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.03.28.10.	Pembangunan tanggul pemecah ombak
1.03.28.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.28.12.	Inventarisasi kerusakan pantai
1.03.28.13.	dst.....
1.03.29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03.29.01.	Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03.29.02.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03.29.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.29.04.	Pengkajian produktifikasi kebun kelapa sawit
1.03.29.05.	dst.....
1.03.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03.30.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
1.03.30.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.03.30.03.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
1.03.30.04.	Pembangunan pasar pedesaan
1.03.30.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan
1.03.30.06.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
1.03.30.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan
1.03.30.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.30.09.	Pembangunan infrastruktur pedesaan
1.03.30.10.	dst.....
1.03.31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03.31.01.	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
1.03.31.02.	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
1.03.31.03.	dst.....
1.03.32.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.03.32.01.	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perorangan, badan usaha)
1.03.32.02.	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perorangan, badan usaha)
1.03.32.03.	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat
1.03.32.04.	dst.....
1.03.33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.03.33.01.	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
1.03.33.02.	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
1.03.33.03.	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi
1.03.33.04.	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
1.03.33.05.	Pengawasan terhadap K-3
1.03.33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi
1.03.33.07.	dst.....
1.04.	PERUMAHAN
1.04.15.	Program Pengembangan Perumahan
1.04.15.01.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1.04.15.02.	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)
1.04.15.03.	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04.15.04.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	perumahan
1.04.15.05.	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan
1.04.15.06.	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
1.04.15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.04.15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.15.09.	dst.....
1.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04.16.01.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
1.04.16.02.	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
1.04.16.03.	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04.16.04.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
1.04.16.05.	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian
1.04.16.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.16.07.	dst.....
1.04.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1.04.17.01.	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
1.04.17.02.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
1.04.17.03.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
1.04.17.04.	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
1.04.17.05.	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
1.04.17.06.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
1.04.17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.17.08.	dst.....
1.04.18.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1.04.18.01.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
1.04.18.02.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
1.04.18.03.	Monitoring evaluasi dan pelaporan
1.04.18.04.	dst.....
1.04.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.19.01.	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.02.	Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.03.	Koordinasi perizinan pemanfaatan gedung
1.04.19.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04.19.05.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04.19.06.	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	kebakaran
1.04.19.07.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.09.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.10.	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.11.	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.04.19.12.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04.19.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.19.14.	dst.....
1.04.20.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.04.20.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
1.04.20.02.	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
1.04.20.03.	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
1.04.20.04.	Koordinasi penataan areal pemakaman
1.04.20.05.	Pemberian perijinan pemakaman
1.04.20.06.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.04.20.07.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.04.20.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.20.09.	dst.....
1.05.	PENATAAN RUANG
1.05.15.	Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.15.01.	Penyusunan kebijakan tentang pengusunan rencana tata ruang
1.05.15.02.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
1.05.15.03.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05.15.04.	Penyusunan rencana tata ruang wilayah
1.05.15.05.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.05.15.06.	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
1.05.15.07.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
1.05.15.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW
1.05.15.09.	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1.05.15.10.	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
1.05.15.11.	Revisi rencana tata ruang
1.05.15.12.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
1.05.15.13.	Survey dan pemetaan
1.05.15.14.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
1.05.15.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05.15.16.	Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
1.05.15.17.	Bimbingan teknis pengelolaan data spasial tingkat lanjut
1.05.15.18.	Sosialisasi rencana tata ruang wilayah
1.05.15.19.	dst.....

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.05.16.	Program Pemanfaatan Ruang
1.05.16.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
1.05.16.02.	Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang
1.05.16.03.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.16.04.	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1.05.16.05.	Survey dan pemetaan
1.05.16.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1.05.16.07.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05.16.08.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
1.05.16.10.	dst.....
1.05.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.17.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.02.	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.03.	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.04.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.05.	Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05.17.06.	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05.17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05.17.09.	dst.....
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.15.	Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.15.01.	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06.15.02.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.15.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
1.06.15.04.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1.06.15.05.	Penyusunan profil daerah
1.06.15.06.	Publikasi data elektronik
1.06.15.07.	Penyusunan dan pengumpulan data statistik
1.06.15.08.	Evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan tenaga kerja
1.06.15.09.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.15.10.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan
1.06.15.11.	Perencanaan dan penyusunan program pengembangan prasarana dan sarana kelautan perikanan
1.06.15.12.	Penyediaan data informasi pada partisipasi pameran nasional pembangunan daerah perbatasan
1.06.15.13.	Perencanaan, pengumpulan dan penyusunan data kehutanan dan perkebunan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.06.15.14.	Penguatan institusional pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan
1.06.15.15.	dst.....
1.06.16.	Program Kerjasama Pembangunan
1.06.16.01.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1.06.16.02.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06.16.03.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1.06.16.04.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.06.16.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.16.06.	Fasilitasi pengembangan kerjasama dan potensi daerah bidang perekonomian
1.06.16.07.	dst.....
1.06.17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.06.17.01.	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
1.06.17.02.	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
1.06.17.03.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
1.06.17.04.	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1.06.17.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.17.06.	Studi potensi dan prospek pengembangan pulau kecil terluar wilayah perbatasan
1.06.17.07.	Fasilitasi dan penunjang sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat dan provinsi
1.06.17.08.	Penunjang perencanaan, pengelolaan, peningkatan potensi kawasan perbatasan
1.06.17.09.	Monitoring dan Evaluasi, Fasilitasi dan Penunjang Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Wilayah Perbatasan
1.06.17.10.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan
1.06.17.11.	Koordinasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan
1.06.17.12.	dst.....
1.06.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.18.01.	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.02.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.18.05.	Penunjang sinkronisasi kebijakan dan pelaksana program pembangunan pemerintah provinsi dan pusat di daerah
1.06.18.06.	Penyusunan masterplan agropolitan
1.06.18.07.	Penyusunan sistem informasi pertanian dan peternakan
1.06.18.08.	Penyusunan profil peternakan
1.06.18.09.	Pengukuran dan optimalisasi petak sawah irigasi teknis
1.06.18.10.	dst.....
1.06.19.	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	Besar
1.06.19.01.	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1.06.19.02.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06.19.03.	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1.06.19.04.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06.19.05.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
1.06.19.06.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
1.06.19.07.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1.06.19.08.	Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran
1.06.19.09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.19.10.	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1.06.19.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.19.12.	dst.....
1.06.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.20.01.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06.20.02.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1.06.20.03.	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1.06.20.04.	dst.....
1.06.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.01.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.21.02.	Penyusunan rancangan RPJPD
1.06.21.03.	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1.06.21.04.	Penetapan RPJPD
1.06.21.05.	Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.21.06.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06.21.07.	Penetapan RPJMD
1.06.21.08.	Penyusunan rancangan RKPD
1.06.21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.21.10.	Penetapan RKPD
1.06.21.11.	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1.06.21.12.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
1.06.21.13.	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.21.14.	Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
1.06.21.15.	Penerapan E-procurement (pelelangan secara elektronik)
1.06.21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
1.06.21.17.	Penyusunan LAKIP
1.06.21.18.	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dan LKPJ - AMJ kepala daerah
1.06.21.19.	Sosialisasi dokumen RPJP

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.06.21.20.	Sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik
1.06.21.21.	Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
1.06.21.22.	Unit Layanan Pengadaan
1.06.21.23.	Penerapan aplikasi penyusunan belanja langsung SKPD
1.06.21.24.	Fasilitasi program pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)
1.06.21.25.	Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan percepatan penyerapan anggaran (TEPPA)
1.06.21.26.	Penyusunan indikator kinerja utama (IKU)
1.06.21.27.	Review dokumen RPJMD
1.06.21.28.	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06.21.29.	pelatihan penerapan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.21.30.	dst.....
1.06.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.22.01.	Penyusunan masterpland pembangunan ekonomi daerah
1.06.22.02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06.22.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1.06.22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.22.05.	Penyusunan tabel input output daerah
1.06.22.06.	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1.06.22.07.	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
1.06.22.08.	Study pengembangan kawasan ekonomi
1.06.22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan
1.06.22.10.	Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah
1.06.22.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.22.12.	Rapat koordinasi bidang ekonomi
1.06.22.13.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target MDG's
1.06.22.13.	dst.....
1.06.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.23.01.	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1.06.23.02.	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1.06.23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.23.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.23.05.	Fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) percepatan pencapaian target MDG,s
1.06.23.06.	dst.....
1.06.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.24.01.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1.06.24.02.	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.06.24.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.06.24.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah/infrastruktur
1.06.24.05.	dst.....
1.06.25.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1.06.25.01.	Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana
1.06.25.02.	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
1.06.25.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.25.04.	dst.....
1.07.	PERHUBUNGAN
1.07.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.15.01.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07.15.02.	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
1.07.15.03.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07.15.04.	Sosialisasi Kebijakan di bidang perhubungan
1.07.15.05.	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07.15.06.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
1.07.15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1.07.15.08.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat
1.07.15.09.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan telekomunikasi
1.07.15.10.	Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara
1.07.15.11.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut
1.07.15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.15.13.	Pengembangan RAB pembangunan bandar udara/enclave sipil
1.07.15.14.	Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran
1.07.15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan
1.07.15.16.	dst.....
1.07.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.16.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.16.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07.16.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07.16.05.	dst.....
1.07.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.17.01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
1.07.17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07.17.03.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1.07.17.04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	keselamatan penumpang
1.07.17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1.07.17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
1.07.17.07.	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
1.07.17.08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1.07.17.09.	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
1.07.17.10.	kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1.07.17.11.	Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
1.07.17.12.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07.17.13.	Fasilitas perizinan di bidang perhubungan
1.07.17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.17.15.	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
1.07.17.16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07.17.17.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.17.18.	Pemeliharaan sarana transportasi laut
1.07.17.19.	Peningkatan pelayanan transportasi darat
1.07.17.20.	Operasional penyelenggaraan bandar udara
1.07.17.21.	Peningkatan pelayanan transportasi darat
1.07.17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan
1.07.17.23.	Pelayanan jasa angkutan laut
1.07.17.24.	Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis
1.07.17.25.	Peningkatan koordinasi forum lalu lintas
1.07.17.26.	Pembentukan dan operasional tim penanggulangan gawat darurat
1.07.17.27.	Diklat pembekalan administrasi umum keudaraan
1.07.17.28.	dst.....
1.07.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.18.01.	Pembangunan gedung terminal
1.07.18.02.	Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal
1.07.18.03.	Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal
1.07.18.04.	Pembangunan bandar udara/enclave sipil
1.07.18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan
1.07.18.06.	dst.....
1.07.19.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Antar Desa di Daerah Tertinggal
1.07.19.01.	Pengadaan moda angkutan barang
1.07.19.02.	Pengadaan moda angkutan penumpang
1.07.19.03.	Pengadaan moda angkutan barang dan penumpang
1.07.19.04.	dst.....
1.07.20.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Rawa/Sungai Antar Desa di Daerah Tertinggal
1.07.20.01.	Pengadaan moda angkutan barang

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.07.20.02.	Pengadaan moda angkutan penumpang
1.07.20.03.	Pengadaan moda angkutan barang dan penumpang
1.07.20.03.	dst.....
1.07.21.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal
1.07.21.01.	Pengadaan moda angkutan barang
1.07.21.02.	Pengadaan moda angkutan penumpang
1.07.21.03.	Pengadaan moda angkutan barang dan penumpang
1.07.21.03.	dst.....
1.07.22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.22.01.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.22.02.	Pengadaan marka jalan
1.07.22.03.	Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07.22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas
1.07.22.05.	pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas
1.07.22.05.	dst.....
1.07.23.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.23.01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
1.07.23.02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.23.03.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.07.23.04.	dst.....
1.07.24.	Program Keselamatan Pelayaran
1.07.24.01.	Sosialisasi keselamatan pelayaran
1.07.24.02.	dst.....
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP
1.08.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
1.08.15.01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08.15.02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08.15.03.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
1.08.15.04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08.15.05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08.15.06.	Bimbingan teknis persampahan
1.08.15.07.	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1.08.15.08.	Kerjasama pengelolaan sampah
1.08.15.09.	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1.08.15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08.15.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08.15.12.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1.08.15.13.	Pembangunan unit pengolahan sampah dalam rangka penerapan prinsip 3R
1.08.15.14.	Studi pembangunan TPA
1.08.15.15.	Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan
1.08.15.16.	Bimbingan teknis daur ulang limbah plastik (padat)

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	domestik menjadi kerajinan rumah tangga
1.08.15.17.	Penilaian kebersihan lingkungan sekolah
1.08.15.18.	Pembangunan TPST 3R
1.08.15.19.	Pembangunan tempat penampungan sampah
1.08.15.20.	dst.....
1.08.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.16.01.	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
1.08.16.02.	Koordinasi penilaian langit biru
1.08.16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan
1.08.16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08.16.05.	Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)
1.08.16.06.	Pengelolaan B3 dan limbah B3
1.08.16.07.	Pengkajian dampak lingkungan
1.08.16.08.	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
1.08.16.09.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
1.08.16.10.	Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
1.08.16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08.16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.16.15.	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
1.08.16.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.16.17.	Sosialisasi undang-undang tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup
1.08.16.18.	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
1.08.16.19.	Seminar hari lingkungan hidup
1.08.16.20.	Pendidikan dan pelatihan PPLHD bagi aparatur pemerintah
1.08.16.21.	Pengadaan sarana dan prasarana pemusnah limbah kesehatan
1.08.16.22.	pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.16.23.	Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3
1.08.16.24.	Invetarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen lingkungan hidup
1.08.16.25.	Seminar hari lingkungan hidup
1.08.16.26.	Sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan UU
1.08.16.27.	dst.....
1.08.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.17.01.	Konversi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
1.08.17.02.	Pantai dan laut lestari
1.08.17.03.	Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut
1.08.17.04.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.08.17.05.	Pengendalian dampak perubahan iklim
1.08.17.06.	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
1.08.17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1.08.17.08.	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08.17.09.	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08.17.10.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.08.17.11.	Pengembangan dan pengelolaan word heritage laut
1.08.17.12.	Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional
1.08.17.13.	koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1.08.17.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08.17.15.	Koordinasi peningkatan pengeloaan kawasan konservasi
1.08.17.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.17.17.	Identifikasi keanekaragaman hayati jenis tumbuhan berhasiat obat (tradisional)
1.08.17.18.	Workshop pengelolaan lingkungan hidup
1.08.17.19.	Identifikasi kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati
1.08.17.20.	Inventarisasi keanekaragaman hayati satwa
1.08.17.21.	Workshop kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah
1.08.17.22.	dst.....
1.08.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08.18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk
1.08.18.02.	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08.18.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan
1.08.18.04.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
1.08.18.05.	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08.18.06.	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitas terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08.18.07.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1.08.18.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.18.09.	dst.....
1.08.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)
1.08.19.02.	Pendidikan dan pelatihan AMDAL tipe-C (AMDAL penilai) bagi aparatur pemerintah
1.08.19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup
1.08.19.04.	Studi kualitas air
1.08.19.05.	Pemetaan status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
1.08.19.06.	Penyusunan neraca kualitas lingkungan daerah
1.08.19.07.	Pelatihan pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap pelaku usaha
1.08.19.08.	Pendidikan dan pelatihan penilaian dokumen UKL UPL bagi

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	aparatur pemerintahan
1.08.19.09.	dst.....
1.08.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.08.20.01.	dst.....
1.08.21.	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
1.08.21.01.	dst.....
1.08.22.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
1.08.22.01.	dst.....
1.08.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.08.23.01.	dst.....
1.08.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08.24.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08.24.02.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08.24.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1.08.24.04.	Penyusunan program pengembangan RTH
1.08.24.05.	Penataan RTH
1.08.24.06.	Pemeliharaan RTH
1.08.24.07.	Pengembangan taman rekreasi
1.08.24.08.	Pengawasan dan pengendalian RTH
1.08.24.09.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1.08.24.10.	Monitoring dan evaluasi
1.08.24.11.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.08.24.12.	dst.....
1.08.25.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.08.25.01.	dst.....
1.09.	PERTANAHAN
1.09.15.	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1.09.15.01.	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
1.09.15.02.	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
1.09.15.03.	dst.....
1.09.16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.16.01.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09.16.02.	Penyuluhan hukum pertanahan
1.09.16.03.	dst.....
1.09.17.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1.09.17.01.	Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09.17.02.	dst.....
1.09.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.09.18.01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
1.09.18.02.	dst.....
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.10.15.01.	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1.10.15.02.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10.15.03.	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1.10.15.04.	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK
1.10.15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10.15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10.15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1.10.15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
1.10.15.09.	Pengembangan database kependudukan
1.10.15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10.15.11.	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1.10.15.12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.15.13.	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1.10.15.14.	Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling
1.10.15.15.	Pelaksanaan penerapan e-KTP
1.10.15.16.	Monitoring dan evaluasi data kependudukan dan catatan sipil
1.10.15.17.	Penyusunan profil kependudukan
1.10.15.18.	Rapat koordinasi kependudukan
1.10.15.19.	Pendataan akte kelahiran penduduk
1.10.15.20.	Sosialisasi tata cara pengisian blanko administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1.10.15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1.10.15.22.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk
1.10.15.23.	dst.....
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.15.01.	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1.11.15.02.	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11.15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.15.04.	Sosialisasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan
1.11.15.05.	Perumusan kebijakan pemenuhan hak sipil a-nak
1.11.15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.15.07.	Pelatihan dan pembekalan anak
1.11.15.08.	Pemantapan koordinasi pokja PUG dan FOCAL POINT PUG
1.11.15.09.	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kecamatan/kelurahan/desa layak anak
1.11.15.10.	dst.....
1.11.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.16.01.	Advokasi dan fasilitas FUG bagi perempuan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.11.16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1.11.16.03.	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16.04.	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1.11.16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11.16.06.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16.07.	Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11.16.08.	Pengembangan sistem informasi gender dan anak
1.11.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.16.10.	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah
1.11.16.11.	dst.....
1.11.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.17.01.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11.17.02.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1.11.17.03.	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1.11.17.04.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
1.11.17.05.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1.11.17.06.	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1.11.17.07.	Penyusunan prrofil perlindungan perempuan lansia dan cacat
1.11.17.08.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11.17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.17.10.	Pengembangan gerakan sayang ibu (GSI)
1.11.17.11.	dst.....
1.11.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.11.18.01.	Pembinaan organisasi perempuan
1.11.18.02.	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
1.11.18.03.	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.18.04.	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
1.11.18.05.	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
1.11.18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.18.07.	Pengembangan dan pembinaan desa prima
1.11.18.08.	dst.....
1.11.19.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.19.01.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
1.11.19.02.	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
1.11.19.03.	Sosialisasi dan pembentukan pengembangan KPAID

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.11.19.04.	dst.....
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.15.	Program Keluarga Berencana
1.12.15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
1.12.15.02.	Pelayanan KIE
1.12.15.03.	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
1.12.15.04.	Promosi pelayanan khiba
1.12.15.05.	Pembinaan keluarga berencana
1.12.15.06.	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12.15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana
1.12.15.08.	dst.....
1.12.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.16.01.	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KKR)
1.12.16.02.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1.12.16.03.	Pelatihan bagi pembina dan konselor sebaya PIK-KRR
1.12.16.04.	dst.....
1.12.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi
1.12.17.01.	Pelayanan konseling KB
1.12.17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12.17.03.	Pengadaan alat kontrasepsi
1.12.17.04.	Pelayanan KB medis operasi
1.12.17.05.	Pelatihan petugas pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12.17.06.	dst.....
1.12.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12.18.01.	Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.12.18.02.	dst.....
1.12.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1.12.19.01.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1.12.19.02.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1.12.19.03.	dst.....
1.12.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.12.20.01.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1.12.20.02.	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
1.12.20.03.	Sosialisasi PIK-KRR di sekolah-sekolah
1.12.20.04.	Pembinaan pembina pengurus kelompok PIK KRR sekolah-sekolah
1.12.20.05.	dst.....
1.12.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1.12.21.01.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
1.12.21.02.	dst.....
1.12.22.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12.22.01.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12.22.02.	dst.....
1.12.23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1.12.23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
1.12.23.02.	Manumbuhkembangkan kelompok tribina dan UPPKS
1.12.23.03.	dst.....
1.12.24.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.12.24.01.	Pengkajian pengembangan model operasional BKB posyandu PADU
1.12.24.02.	dst.....
1.13.	SOSIAL
1.13.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.15.01.	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya
1.13.15.02.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13.15.03.	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.13.15.04.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13.15.05.	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13.15.06.	Rehabilitasi rumah tak layak huni
1.13.15.07.	Pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kelompok usaha bersama (KUBE)
1.13.15.08.	Penyediaan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni
1.13.15.09.	Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang
1.13.15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.13.15.11.	dst.....
1.13.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.16.01.	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1.13.16.02.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.13.16.03.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.13.16.04.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
1.13.16.05.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1.13.16.06.	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre
1.13.16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.13.16.08.	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13.16.09.	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.13.16.10.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13.16.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan
1.13.16.13.	Santunan dan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia non potensial dan orang dengan kecacatan berat
1.13.16.14.	Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial
1.13.16.15.	dst.....
1.13.17.	Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.17.01.	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1.13.17.02.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1.13.17.03.	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1.13.17.04.	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
1.13.17.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13.17.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.17.07.	dst.....
1.13.18.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.13.18.01.	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1.13.18.02.	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan penyandang cacat dan trauma
1.13.18.03.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13.18.04.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13.18.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan penyidik
1.13.18.06.	dst.....
1.13.19.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1.13.19.01.	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13.19.02.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo
1.13.19.03.	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13.19.04.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
1.13.19.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13.19.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.19.07.	dst.....
1.13.20.	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13.20.01.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.02.	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.03.	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.04.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.13.20.06.	dst.....
1.13.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13.21.02.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13.21.05.	Penyuluhan dan pendampingan KUBE
1.13.21.06.	Pembentukan dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
1.13.21.07.	dst.....
1.14.	KETENAGAKERJAAN
1.14.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.01.	Penyusunan database tenaga kerja daerah
1.14.15.02.	Pembangunan balai latihan kerja
1.14.15.03.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
1.14.15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1.14.15.05.	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
1.14.15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1.14.15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1.14.15.08.	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
1.14.15.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.15.10.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit
1.14.15.11.	Pengadaan sarana dan prasarana BLK
1.14.15.12.	Pembangunan drainase, batu miring dan paving block asrama BLK
1.14.15.13.	Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja perminyakan
1.14.15.14.	dst.....
1.14.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.16.01.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14.16.02.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14.16.03.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14.16.04.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14.16.05.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.14.16.06.	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1.14.16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.16.08.	Pengadaan peralatan kerja bagi pencari kerja
1.14.16.09.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
1.14.16.10.	Try out tenaga kerja sektor pemerintahan
1.14.16.11.	dst.....
1.14.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.17.01.	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.02.	Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	hubungan industrial
1.14.17.03.	Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14.17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14.17.05.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14.17.06.	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.07.	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.17.09.	Survey kebutuhan hidup layak untuk penetapan pendapatan dan upah tenaga kerja
1.14.17.10.	Pembinaan ketenagakerjaan
1.14.17.11.	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dewan pengupahan kabupaten
1.14.17.12.	dst.....
1.14.18.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.18.01.	dst.....
1.14.19.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1.14.19.01.	Pembinaan perusahaan dan penyediaan jaminan sosial tenaga kerja
1.14.19.02.	dst.....
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1.15.15.01.	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
1.15.15.02.	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
1.15.15.03.	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
1.15.15.04.	Pendirian unit penanganan pengaduan
1.15.15.05.	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
1.15.15.06.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
1.15.15.07.	Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah
1.15.15.08.	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
1.15.15.09.	Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah
1.15.15.10.	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah
1.15.15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.15.12.	Penilaian kesehatan koperasi dan audit koperasi
1.15.15.13.	Kajian pengembangan pemberdayaan koperasi dan UMKM
1.15.15.14.	dst.....
1.15.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.16.01.	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
1.15.16.02.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing
1.15.16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.15.16.04.	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
1.15.16.05.	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15.16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15.16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
1.15.16.08.	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
1.15.16.09.	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah
1.15.16.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.16.11.	Pelatihan dan operasional pendamping dana bergulir dan ekonomi produktif
1.15.16.12.	Monitoring dan evaluasi pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM
1.15.16.13.	Pelatihan kewirausahaan untuk usaha mikro kecil dan menengah
1.15.16.14.	Pembinaan dan penyaluran dana penguatan modal pengembangan rumput laut
1.15.16.15.	Bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin
1.15.16.16.	Survey dan pendataan klasifikasi sektor usaha mikro kecil dan menengah
1.15.16.17.	Pelatihan OVOP (one village one product) bagi koperasi dan UMKM
1.15.16.18.	dst.....
1.15.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.01.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1.15.17.02.	Pengembangan klaster bisnis
1.15.17.03.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
1.15.17.04.	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
1.15.17.05.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
1.15.17.06.	Pengembangan saranan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
1.15.17.07.	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
1.15.17.08.	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1.15.17.09.	Pameran promosi produk unggulan koperasi dan usaha mikro kecil menengah
1.15.17.10.	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1.15.17.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan aktifitas perekonomian
1.15.17.12.	Pelatihan manajemen pemasaran bagi UKM dan promosi koperasi
1.15.17.13.	Penyuluhan dan pendampingan UMKM
1.15.17.14.	Pelatihan,operasional pendamping dana bergulir dan ekonomi produktif dan pemutakhiran dan evaluasi data tenaga pendamping
1.15.17.15.	Kajian pengembangan lembaga ekonomi mikro
1.15.17.16.	Pendampingan produk unggulan koperasi dan UMKM melalui pendekatan OVOP (One Village One Product)
1.15.17.17.	Pembinaan serta operasional terhadap koordinator dan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	tenaga pendamping penerima dana bergulir dan ekonomi produktif
1.15.17.18.	Pengawasan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir
1.15.17.19.	Pendampingan program pengentasan kemiskinan untuk Bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin
1.15.17.20.	Monitoring, evaluasi dan pengawasan bantuan pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan
1.15.17.21.	dst.....
1.15.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.18.01.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1.15.18.02.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasiaan
1.15.18.03.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
1.15.18.04.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15.18.05.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
1.15.18.06.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1.15.18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
1.15.18.08.	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1.15.18.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.18.10.	Sosialisasi dan bimbingan teknis pembinaan koperasi, organisasi ketatalaksanaan dan usaha permodalan koperasi
1.15.18.11.	Pelatihan manajemen organisasi, usaha, akuntansi, permodalan dan pengurus koperasi penyusunan laporan pertanggungjawaban dan rencana kerja koperasi
1.15.18.12.	Pelatihan penyusunan laporan rapat anggota tahunan dan rencana kerja koperasi bagi pengurus koperasi
1.15.18.13.	Bimbingan teknis kelembagaan koperasi bagi aparatur
1.15.18.14.	Revitalisasi kelembagaan koperasi
1.15.18.15.	dst.....
1.15.19.	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
1.15.19.01.	dst.....
1.16.	PENANAMAN MODAL
1.16.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.15.01.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
1.16.15.02.	Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16.15.03.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
1.16.15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
1.16.15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.16.15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
1.16.15.07.	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.16.15.08.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16.15.09.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
1.16.15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi
1.16.15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16.15.12.	dst.....
1.16.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.16.01.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1.16.16.02.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
1.16.16.03.	Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penanaman modal
1.16.16.04.	Pengembangan sistem informasi penanaman modal
1.16.16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
1.16.16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1.16.16.07.	Kajian kebijakan penanaman modal
1.16.16.08.	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
1.16.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16.16.10.	Sosialisasi perizinan dan penanaman modal
1.16.16.11.	dst.....
1.16.17.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1.16.17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1.16.17.02.	dst.....
1.17.	KEBUDAYAAN
1.17.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17.15.02.	Penatagunaan naskah kuno nusantara
1.17.15.03.	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
1.17.15.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17.15.05.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1.17.15.06.	dst.....
1.17.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.16.01.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17.16.02.	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17.16.03.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.16.04.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejahtera, purbakala, museum, dan peninggalan bawah air
1.17.16.06.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.17.16.07.	Pengembangan nilai dan geografis sejarah
1.17.16.08.	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
1.17.16.09.	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
1.17.16.10.	Pembangunan panggung atraksi budaya

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.17.16.11.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1.17.16.12.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1.17.16.13.	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
1.17.16.14.	Penelitian dan sosialisasi benda cagar budaya
1.17.16.15.	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolan kekayaan budaya
1.17.16.16.	Seleksi parade tari tingkat kabupaten dan parade tingkat provinsi
1.17.16.17.	Pembinaan sanggar dan kelompok/perkumpulan seni
1.17.16.18.	Partisipasi kegiatan kebudayaan
1.17.16.19.	Pementasan seni dan budaya
1.17.16.20.	Melaksanakan lomba dan sayembara kebudayaan
1.17.16.21.	Pembangunan rumah adat
1.17.16.22.	Pembuatan perencanaan museum kebudayaan
1.17.16.23.	dst.....
1.17.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.17.01.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.17.02.	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
1.17.17.03.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1.17.17.05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17.17.06.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktulisasi budaya lokal
1.17.17.07.	Partisipasi parade tari daerah
1.17.17.08.	Pagelaran atraksi seni dan budaya daerah
1.17.17.09.	Revitalisasi dan reaktualisasi budaya
1.17.17.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1.17.17.12.	Partisipasi kegiatan budaya di luar daerah dan luar negeri
1.17.17.13.	Pementasan seni budaya
1.17.17.14.	dst.....
1.17.18.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.18.01.	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
1.17.18.02.	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
1.17.18.03.	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1.17.18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.17.18.05.	Ekspedisi budaya
1.17.18.06.	Cetak buku-buku budaya
1.17.18.07.	dst.....
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.18.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18.15.01.	Pendataan potensi kepemudaan
1.18.15.02.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
1.18.15.03.	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	pembangunan kepemudaan
1.18.15.04.	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
1.18.15.05.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
1.18.15.06.	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
1.18.15.07.	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1.18.15.08.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
1.18.15.09.	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
1.18.15.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18.15.11.	dst.....
1.18.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18.16.02.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18.16.03.	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan
1.18.16.04.	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1.18.16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
1.18.16.06.	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
1.18.16.07.	Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan
1.18.16.08.	Pameran prestasi hasil karya pemuda
1.18.16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional
1.18.16.10.	Peningkatan mutu perilaku pemuda melalui penyuluhan ESQ
1.18.16.11.	Seminar sehari pemuda bahari
1.18.16.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18.16.14.	Sosialisasi undang-undang tentang kepramukaan
1.18.16.15.	dst.....
1.18.17.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1.18.17.01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.18.17.02.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda
1.18.17.03.	dst.....
1.18.18.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1.18.18.01.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1.18.18.02.	dst.....
1.18.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.18.19.01.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1.18.19.02.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standardisasi profesi
1.18.19.03.	Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
1.18.19.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
1.18.19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18.19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18.19.07.	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
1.18.19.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.18.19.09.	dst.....
1.18.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18.20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18.20.02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
1.18.20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18.20.04.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18.20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.18.20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18.20.07.	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.18.20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi
1.18.20.09.	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
1.18.20.10.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
1.18.20.11.	Pengembangan olahraga rekreasi
1.18.20.12.	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
1.18.20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
1.18.20.14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18.20.15.	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
1.18.20.16.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
1.18.20.17.	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
1.18.20.18.	dst.....
1.18.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.21.01.	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah & masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.03.	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.04.	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.05.	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.06.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.07.	dst.....
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.15.01.	Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.15.02.	Pembangunan pos jaga/ronda
1.19.15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.15.04.	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.19.15.05.	Pengendalian keamanan lingkungan
1.19.15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.15.07.	Pendataan anggota hansip di kelurahan, desa dan kecamatan
1.19.15.08.	Latihan pemantapan anggota pemadam kebakaran
1.19.15.09.	Diklat bela diri praja wibawa
1.19.15.10.	dst.....
1.19.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.16.01.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.19.16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19.16.03.	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
1.19.16.04.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19.16.05.	Peningkatan fungsi komunitas intelijen daerah
1.19.16.06.	Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu
1.19.16.07.	Sosialisasi peningkatan forum kewaspadaan dini masyarakat
1.19.16.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.16.09.	Peningkatan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah
1.19.16.10.	Pelatihan deteksi dini bagi apartur pemerintah
1.19.16.11.	Tim terpadu penanganan gangguan keamanan
1.19.16.12.	Pendukung penyelenggaraan pemilu
1.19.16.13.	Peningkatan kapasitas aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan Perda dan Perbup
1.19.16.14.	dst.....
1.19.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19.17.02.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
1.19.17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19.17.04.	Pelatihan manajemen konflik bagi aparatur pemerintahan
1.19.17.05.	Peningkatan forum kerukunan antar umat beragama
1.19.17.32.	Peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.17.33.	dst.....
1.19.18.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.18.01.	Fasilitas pencapai halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.02.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.03.	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.04.	Sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme bagi pelajar
1.19.18.05.	dst.....
1.19.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.19.19.01.	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.19.19.02.	Pembinaan anggota linmas
1.19.19.03.	Pembentukan dan pelatihan linmas
1.19.19.04.	dst.....
1.19.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
1.19.20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.19.20.02.	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1.19.20.03.	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1.19.20.04.	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1.19.20.05.	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1.19.20.06.	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1.19.20.07.	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
1.19.20.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.20.09.	dst.....
1.19.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.21.01.	Penyuluhan kepada masyarakat
1.19.21.02.	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
1.19.21.03.	Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.19.21.04.	Penyusunan database partai politik
1.19.21.05.	Pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
1.19.21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat
1.19.21.07.	Penyusunan database idpoleksosbudkam
1.19.21.08.	Check and balance dinamis antar lembaga eksekutif dan legislatif
1.19.21.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.21.10.	Kajian partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon legeslatif
1.19.21.11.	dst.....
1.19.22.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.22.01.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.19.22.02.	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1.19.22.03.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1.19.22.04.	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1.19.22.05.	Pendataan, penyusunan dan pemetaan daerah rawan bencana
1.19.22.06.	Pelatihan dasar manajemen disaster bagi aparatur kecamatan dan desa
1.19.22.07.	dst.....
1.19.23.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.19.23.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.19.23.02.	dst.....

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)
1.20.15.02.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1.20.15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.15.04.	Rapat-rapat paripurna
1.20.15.05.	Kegiatan reses
1.20.15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1.20.15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20.15.08.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD
1.20.15.10.	Peningkatan kapasitas kompetensi bidang pengawasan, budgeter dan legislasi
1.20.15.11.	Proses pelantikan bupati dan wakil bupati
1.20.15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
1.20.15.13.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri
1.20.15.14.	Sosialisasi tugas dan fungsi DPRD
1.20.15.15.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh pemuda
1.20.15.16.	Pembahasan kajian akademis pemekaran kabupaten
1.20.15.17.	dst.....
1.20.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.16.01.	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20.16.02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
1.20.16.03.	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1.20.16.04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
1.20.16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20.16.06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.20.16.07.	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
1.20.16.08.	Pembekalan dan pelatihan kapasitas camat sebagai PPAT
1.20.16.09.	Rapat kerja aparatur kecamatan dan kelurahan
1.20.16.10.	Penilaian camat terbaik
1.20.16.11.	dst.....
1.20.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.17.01.	Penyusunan analisa standar belanja
1.20.17.02.	Penyusunan standar satuan harga
1.20.17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1.20.17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.17.05.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1.20.17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
1.20.17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
1.20.17.08.	Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD berdasarkan sistem akuntansi pemerintah
1.20.17.09.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penggajian
1.20.17.10.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah
1.20.17.12.	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20.17.13.	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.14.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.15.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.16.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20.17.17.	Peningkatan manajemen investasi daerah
1.20.17.18.	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.20.17.19.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.17.20.	Penyusunan buku petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
1.20.17.21.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pelaporan akuntansi pemerintah
1.20.17.22.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan
1.20.17.23.	Bimbingan teknis tata usaha keuangan daerah
1.20.17.24.	Bimbingan teknis penyusunan anggaran
1.20.17.25.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan
1.20.17.26.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian
1.20.17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah
1.20.17.28.	Pendamping program/kegiatan bantuan luar negeri
1.20.17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.30.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah
1.20.17.31.	Monitoring aset
1.20.17.32.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah SKPD
1.20.17.33.	Bimbingan teknis pemungutan dan penagihan pajak daerah
1.20.17.34.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB
1.20.17.35.	Pemutahiran data wajib pajak dan retribusi daerah
1.20.17.36.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) dan anggaran kas
1.20.17.37.	Penyelenggaraan pelayanan SP2D
1.20.17.38.	Perubahan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.39.	Penyusunan standar operasional dan prosedur
1.20.17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan
1.20.17.41.	Penyusunan buku daftar pengguna kendaraan milik pemerintah daerah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.17.42.	Penyusunan laporan barang inventaris
1.20.17.43.	Inventarisasi aset tanah dan bangunan
1.20.17.44.	Penyusunan daftar aset tanah dan bangunan
1.20.17.45.	Penyusunan daftar kebutuhan barang
1.20.17.46.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah
1.20.17.47.	Bimbingan teknis aplikasi pajak bumi dan bangunan
1.20.17.48.	Sosialisasi PBB perkotaan dan perdesaan
1.20.17.49.	Studi banding penggalian pajak dan redistribusi daerah
1.20.17.50.	Evaluasi tentang penetapan dan perhitungan ulang pajak
1.20.17.51.	Kajian tentang pemanfaatan potensi barang daerah sebagai peningkatan PAD
1.20.17.52.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah
1.20.17.53.	Pembangunan sistem informasi manajemen barang daerah
1.20.17.54.	Penyusunan standar operasional dan prosedur pengelolaan barang daerah
1.20.17.55.	Penghapusan dan pemindahtanganan/penjualan kendaraan perorang dinas milik daerah
1.20.17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah
1.20.17.57.	Pelatihan petugas pencacah dan verifikator sensus barang daerah
1.20.17.58.	Sensus barang daerah
1.20.17.59.	Sosialisasi askes dan taspen
1.20.17.60.	Penyediaan sistem aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
1.20.17.61.	Peningkatan administrasi dan legitimasi barang milik daerah
1.20.17.62.	Pengamanan aset/barang milik daerah
1.20.17.63.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
1.20.17.64.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah
1.20.17.65.	Sosialisasi perpajakan
1.20.17.66.	Teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
1.20.17.67.	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
1.20.17.68.	Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
1.20.17.69.	Pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
1.20.17.70.	Pungutan pajak melalui databse untuk mengoptimalkan PAD
1.20.17.71.	Penyusunan dan penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah
1.20.17.72.	Monitoring dan sinkronisasi laporan pembukuan pajak daerah di kecamatan
1.20.17.73.	Inventarisasi barang milik daerah SKPD
1.20.17.74.	Pendampingan pengelolaan subsidi
1.20.17.75.	dst.....
1.20.18.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.18.01.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1.20.18.02.	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	APBD kabupaten/kota
1.20.18.03.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
1.20.18.04.	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1.20.18.05.	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
1.20.18.06.	dst.....
1.20.19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.19.01.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
1.20.19.02.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1.20.19.03.	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
1.20.19.04.	Bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.20.19.05.	Pembinaan desa
1.20.19.06.	dst.....
1.20.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.20.02.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20.20.03.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.20.04.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
1.20.20.05.	Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20.20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.20.09.	Pelaksanaan review laporan keuangan
1.20.20.10.	Gelar pengawasan daerah (LARWASDA) pemerintah
1.20.20.11.	Intensifikasi penyelesaian kerugian negara/daerah
1.20.20.12.	Penyusunan sistem dan prosedur pelaksanaan SPIP
1.20.20.13.	Sosialisasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
1.20.20.14.	dst.....
1.20.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.21.02.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1.20.21.03.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah (evaluasi LAKIP SKPD)
1.20.21.04.	dst.....
1.20.22.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.22.01.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.22.02.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.22.03.	Pembakuan nama rupa bumi
1.20.22.04.	Fasilitasi dan koordinasi penetapan batas wilayah

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.22.05.	dst.....
1.20.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20.23.02.	Penyediaan jasa internet
1.20.23.03.	Peremajaan dan pemanfaatan internet seluler sebagai peralatan pendukung komunikasi
1.20.23.04.	Pengadaan jaringan internet
1.20.23.05.	Media center pemerintah daerah
1.20.23.06.	dst.....
1.20.24.	Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1.20.24.02.	dst.....
1.20.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20.25.01.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.20.25.02.	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1.20.25.03.	Fasilitasi pembentukkan kerjasama antar daerah di bidang hukum
1.20.25.04.	Fasilitasi/pembentukkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1.20.25.05.	dst.....
1.20.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20.26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1.20.26.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20.26.04.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.26.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20.26.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1.20.26.07.	Sistem informasi dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
1.20.26.08.	dst.....
1.20.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.27.01.	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
1.20.27.02.	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
1.20.27.03.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20.27.04.	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru
1.20.27.05.	Fasilitasi pemekaran wilayah
1.20.27.06.	Fasilitasi peresmian pemekaran desa baru
1.20.27.07.	Kajian akademis pemekaran Daerah Otonomi Baru
1.20.27.08.	dst.....
1.20.28.	Program Pendidikan Kedinasan
1.20.28.01.	Pendidikan dan pelatihan teknis

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.28.02.	Pendidikan penjenjangan struktural
1.20.28.03.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
1.20.28.04.	Pembuatan buku juknis/juklak
1.20.28.05.	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
1.20.28.06.	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
1.20.28.07.	dst.....
1.20.29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.29.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir dan PNS
1.20.29.02.	Seleksi penerimaan CPNS
1.20.29.03.	Penempatan PNS
1.20.29.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20.29.05.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.20.29.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1.20.29.07.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
1.20.29.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1.20.29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20.29.10.	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
1.20.29.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan bantuan dinas
1.20.29.12.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
1.20.29.13.	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
1.20.29.14.	Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
1.20.29.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.29.16.	Koordinasi penyelenggaraan diklat
1.20.29.17.	Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
1.20.29.18.	Pemilihan PNS dan PTT teladan
1.20.29.19.	Pemukhtahiran tanda pengenalan PNS
1.20.29.20.	Sosialisasi jabatan fungsional (penghitungan angka kredit)
1.20.29.21.	Tugas belajar bagi PNS
1.20.29.22.	Bantuan pendidikan dan monitoring praja IPDN
1.20.29.23.	Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
1.20.29.24.	Orientasi CPNS dan PNS
1.20.29.25.	Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian
1.20.29.26.	dst.....
1.20.30.	Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
1.20.30.01.	Pembebasan dan pensertifikatan tanah
1.20.30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah
1.20.30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah
1.20.30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Boyolali Kota
1.20.30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah
1.20.30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Boyolali Darat
1.20.30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau
1.20.30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.20.30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan
1.20.30.10.	Palatihan pertanahan bagi perangkat kecamatan, kelurahan dan desa
1.20.30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
1.20.30.12.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
1.20.30.13.	dst.....
1.20.31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
1.20.31.01.	Penyuluhan hukum
1.20.31.02.	Litigasi dan non litigasi
1.20.31.03.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perda dan produk hukum daerah
1.20.31.04.	Pelaksanaan lomba kadarkum
1.20.31.05.	Inventarisasi dan kompilasi produk hukum daerah
1.20.31.06.	Rapat koordinasi dan fasilitasi RANHAM
1.20.31.07.	dst.....
1.21.	KETAHANAN PANGAN
1.21.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.21.15.01.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
1.21.15.02.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
1.21.15.03.	Peningkatan kemampuan lembaga petani
1.21.15.04.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
1.21.15.05.	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
1.21.15.06.	Penyuluhan dan pelatihan pertanian/peternakan bagi petugas dan petani
1.21.15.07.	Pendampingan pekan nasional (PENAS)
1.21.15.08.	dst.....
1.21.16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.21.16.01.	Pengembangan desa mandiri pangan
1.21.16.02.	Pengembangan lumbung pangan masyarakat
1.21.16.03.	Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)
1.21.16.04.	Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
1.21.16.05.	Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan
1.21.16.06.	Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan
1.21.16.07.	Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen
1.21.16.08.	Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
1.21.16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
1.21.16.10.	Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan promosi
1.21.16.11.	Lomba cipta menu 3B
1.21.16.12.	dst.....

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.21.17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21.17.01.	Pengembangan lumbung pangan desa
1.21.17.02.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1.21.17.03.	Inventarisasi data statistik perkebunan
1.21.17.04.	Penanganan daerah rawan pangan untuk daerah miskin/tertinggal
1.21.17.05.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketahanan pangan
1.21.17.06.	Pelaksanaan study banding oleh petani dan petugas dalam rangka mendukung ketahanan pangan
1.21.17.07.	Sosialisasi bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal
1.21.17.08.	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
1.21.17.09.	Pelatihan analisis dan nasional (HKBN) dan analisis neraca bahan makanan (NBM), pola pangan harapan (PPH), angka kecukupan gizi (AKG) dan prognosa hari-hari besar keagamaan dan nasional (HKBN)
1.21.17.10.	dst.....
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.22.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.22.15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1.22.15.02.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1.22.15.03.	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1.22.15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan
1.22.15.05.	Pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan
1.22.15.06.	Pendamping program pengembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP)
1.22.15.07.	Lomba desa dan kelurahan
1.22.15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK
1.22.15.09.	Pendamping program beras miskin (RASKIN)
1.22.15.10.	Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
1.22.15.11.	Pembekalan substantif pemberdayaan masyarakat desa
1.22.15.12.	Pembentukan kelompok prasarana (KPP)
1.22.15.13.	Pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri integrasi
1.22.15.14.	Pembinaan kader posyandu
1.22.15.15.	Penyusunan buku saku pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa
1.22.15.16.	Pendamping Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK)
1.22.15.17.	dst.....
1.22.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22.16.01.	Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
1.22.16.02.	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
1.22.16.03.	Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
1.22.16.04.	Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan
1.22.16.05.	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.22.16.06.	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1.22.16.07.	Pembinaan dan peningkatan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1.22.16.08.	Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes)
1.22.16.09.	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah
1.22.16.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.16.11.	Pemantapan kapasitas manajemen operasional dan keuangan badan usaha milik desa (BUMD)
1.22.16.12.	dst.....
1.22.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22.17.03.	Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22.17.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.17.05.	Bulan bakti gotong royong
1.22.17.06.	dst.....
1.22.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22.18.01.	Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
1.22.18.02.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.22.18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
1.22.18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.18.05.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
1.22.18.06.	dst.....
1.22.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
1.22.19.01.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
1.22.19.02.	dst.....
1.22.20.	Program Pembinaan Otonomi Desa
1.22.20.01.	dst.....
1.22.21.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan
1.22.21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)
1.22.21.02.	Sosialisasi pembentukan pos pelayanan teknologi desa (posyantek)
1.22.21.03.	Bimbingan teknis manajemen posyantek
1.22.21.04.	Peningkatan fungsi posyantekdes
1.22.21.05.	dst.....
1.22.22.	Program Penanggulangan Kemiskinan
1.22.22.01.	dst.....
1.23.	STATISTIK
1.23.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.23.15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23.15.02.	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1.23.15.03.	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1.23.15.04.	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.23.15.05.	dst.....
1.24.	KEARSIPAN
1.24.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.15.01.	Pembangunan database informasi kearsipan
1.24.15.02.	Pengumpulan data
1.24.15.03.	Pengklasifikasian data
1.24.15.04.	Penyusunan sistem katalog data
1.24.15.05.	Pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
1.24.15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan
1.24.15.07.	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1.24.15.08.	Pembinaan kearsipan kecamatan dan desa
1.24.15.09.	dst.....
1.24.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.24.16.01.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24.16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24.16.03.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1.24.16.04.	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
1.24.16.05.	dst.....
1.24.17.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.24.17.01.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24.17.02.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24.17.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1.24.17.04.	dst.....
1.24.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.24.18.01.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
1.24.18.02.	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
1.24.18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
1.24.18.04.	dst.....
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
1.25.15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1.25.15.03.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25.15.04.	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1.25.15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25.15.06.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25.15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1.25.15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
1.25.15.09.	Publikasi informasi melalui data elektronik

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1.25.15.10.	Pendukung operasional MPLIK
1.25.15.11.	Pelatihan pengelolaan website
1.25.15.12.	dst.....
1.25.16.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1.25.16.01.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.25.16.02.	dst.....
1.25.17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25.17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25.17.02.	Operasional kelompok masyarakat
1.25.17.03.	dst.....
1.25.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1.25.18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25.18.02.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah desa
1.25.18.03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.25.18.04.	Penambahan jumlah jaringan komunikasi
1.25.18.05.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda dengan media cetak
1.25.18.06.	Implementasi E-Goverment untuk cetak biru/blue print
1.25.18.07.	dst.....
1.26.	PERPUSTAKAAN
1.26.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.15.01.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.26.15.02.	Pengembangan minat dan budaya baca
1.26.15.03.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.26.15.04.	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.26.15.05.	Penyediaan bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1.26.15.06.	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1.26.15.07.	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1.26.15.08.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.26.15.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.26.15.10.	Pengembangan teknologi informasi perpustakaan
1.26.15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.26.15.12.	Pameran buku, bedah buku dan apresiasi minat baca
1.26.15.13.	Pelayanan perpustakaan keliling
1.26.15.14.	dst.....
2.01.	PERTANIAN
2.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.15.01.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.15.02.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.01.15.03.	Peningkatan kemampuan lembaga petani

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.01.15.04.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
2.01.15.05.	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
2.01.15.06.	Demfarm dan pendampingan kegiatan budidaya jagung dan kedelai
2.01.15.07.	Pendampingan pekan nasional (PENAS)
2.01.15.08.	dst.....
2.01.16.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.16.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.16.02.	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
2.01.16.03.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.16.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.16.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.16.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.16.07.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
2.01.16.08.	Penyuluhan pemasaran produk pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
2.01.16.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
2.01.16.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.01.16.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.01.16.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
2.01.16.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.16.14.	Pemeliharaan kebun induk tanaman karet
2.01.16.15.	Pameran hasil produksi pertanian
2.01.16.16.	Pengadaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
2.01.16.17.	dst.....
2.01.17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.17.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.17.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.17.03.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.17.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.17.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.17.06.	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2.01.17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.17.08.	Pelatihan dan bimbingan petugas statistik pertanian (SP)
2.01.17.09.	dst.....
2.01.18.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.18.01.	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01.18.02.	Penyediaan sarana produksi perkebunan tanaman perkebunan
2.01.18.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Entrys)
2.01.18.04.	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.18.05.	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2.01.18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.18.07.	Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
2.01.18.08.	Peremajaan tanaman cengkeh
2.01.18.09.	Pengembangan kebun induk tanaman karet
2.01.18.10.	Pengembangan perkebunan kakao dan kopi
2.01.18.11.	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
2.01.18.12.	Pembangunan kebun karet rakyat
2.01.18.13.	Perluasan areal tanaman perkebunan karet
2.01.18.14.	Pengembangan intensifikasi tanaman palawija dan sayuran
2.01.18.15.	Pengembangan tanaman kelapa
2.01.18.16.	Pengembangan tanaman karet unggul
2.01.18.17.	Pelatihan teknologi terkini pengadaan bahan tanaman karet unggul
2.01.18.18.	Penyusunan data potensi/database pertanian dan peternakan
2.01.18.19.	Pengembangan intensifikasi sayuran rempah
2.01.18.20.	Pemeliharaan balai benih utama
2.01.18.21.	Optimasi lahan persawahan
2.01.18.22.	Pemeliharaan tanaman karet
2.01.18.23.	Pemeliharaan kebun induk tanaman karet
2.01.18.24.	Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman cengkeh
2.01.18.25.	Pengadaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
2.01.18.26.	Pengembangan tanaman cengkeh unggul
2.01.18.27.	Pengembangan tanaman hortikultura
2.01.18.28.	Ekstensifikasi Tanaman Karet
2.01.18.29.	dst.....
2.01.19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.19.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.19.02.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.19.03.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2.01.19.04.	dst.....

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.01.20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.20.01.	Pendataan masalah peternakan
2.01.20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01.20.03.	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01.20.04.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2.01.20.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.20.06.	Pengendalian dan pemberantasan hewan liar
2.01.20.07.	Pelatihan dan bimbingan kader kesehatan hewan (KESWAN)
2.01.20.08.	Sosialisasi penanggulangan penyakit menular ternak
2.01.20.09.	Pemantauan penyebaran penyakit hewan menular
2.01.20.10.	Penyebaran informasi peternakan
2.01.20.11.	dst.....
2.01.21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01.21.01.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2.01.21.02.	Pembibitan dan perawatan ternak
2.01.21.03.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.01.21.04.	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2.01.21.05.	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
2.01.21.06.	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
2.01.21.07.	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
2.01.21.08.	Pengembangan agribisnis peternakan
2.01.21.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.21.10.	Pelatihan dan bimbingan kepada kader kesehatan hewan
2.01.21.11.	Pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau
2.01.21.12.	Pengembangan hijauan makanan ternak (HMT)
2.01.21.13.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.01.21.14.	dst.....
2.01.22.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.01.22.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01.22.02.	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
2.01.22.03.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01.22.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
2.01.22.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01.22.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
2.01.22.07.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01.22.08.	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2.01.22.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
2.01.22.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01.22.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01.22.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	peternakan yang akan dipasarkan
2.01.22.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.22.14.	dst.....
2.01.23.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.01.23.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2.01.23.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01.23.03.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01.23.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
2.01.23.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
2.01.23.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.23.07.	dst.....
2.01.24.	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
2.01.24.01.	dst.....
2.01.25.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
2.01.25.01.	Pendampingan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
2.01.25.02.	dst.....
2.02.	KEHUTANAN
2.02.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.02.15.01.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
2.02.15.02.	Pengembangan hutan tanaman
2.02.15.03.	Pengembangan hasil hutan non-kayu
2.02.15.04.	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
2.02.15.05.	Optimalisasi PNBK
2.02.15.06.	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2.02.15.07.	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2.02.15.08.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2.02.15.09.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.02.15.10.	Penyusunan data dasar teknis kehutanan
2.02.15.11.	Sosialisasi penatausahaan dan peredaran hasil hutan
2.02.15.12.	Pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat
2.02.15.13.	Pemeliharaan tanaman pandan
2.02.15.14.	dst.....
2.02.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.16.01.	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2.02.16.02.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02.16.03.	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
2.02.16.04.	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2.02.16.05.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.16.07.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.02.16.08.	Rehabilitasi, peningkatan sarana prasarana pengamanan hutan dan lahan serta penyuluhan kehutanan
2.02.16.09.	dst.....
2.02.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.02.17.01.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.02.	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.03.	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.04.	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.05.	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
2.02.17.06.	Penunjukan pohon induk (tegakan teridentifikasi) pada kawasan hutan lindung
2.02.17.07.	Pengamanan kawasan hutan
2.02.17.08.	Pembuatan trayek dan pemasangan pal batas kawasan hutan lindung (Rekonstruksi)
2.02.17.09.	Pengembangan tanaman gaharu
2.02.17.10.	dst.....
2.02.18.	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
2.02.18.01.	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
2.02.18.02.	dst.....
2.02.19.	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
2.02.19.01.	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02.19.02.	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02.19.03.	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2.02.19.04.	Perluasan akses layanan informasi pemasaran industri hasil hutan
2.02.19.05.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.02.19.06.	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kehutanan
2.02.19.07.	dst.....
2.02.20.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2.02.20.01.	Pengembangan hutan masyarakat adat
2.02.20.02.	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
2.02.20.03.	Penyusunan master plan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan
2.02.20.04.	Survey inventarisasi fauna yang berpotensi untuk pemanfaatan
2.02.20.05.	Penyusunan paduserasi kawasan hutan
2.02.20.06.	Fasilitasi penyelesaian proses paduserasi
2.02.20.07.	Sosialisasi hasil paduserasi kawasan hutan
2.02.20.08.	Sosialisasi dan studi banding kesatuan pemangkuan hutan
2.02.20.09.	Sosialisasi hutan kemasyarakatan dan hutan desa
2.02.20.10.	dst.....
2.02.21.	Program Penataan dan Pemantapan Status Kawasan Hutan
2.02.21.01.	dst.....
2.02.22.	Program Pengamanan dan Pengendalian Satwa Liar yang di Lindungi

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.02.22.01.	dst.....
2.02.23.	Program Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
2.02.23.01.	dst.....
2.03.	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.15.01.	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.02.	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.03.	Monitoring dan pengendalian mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.04.	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2.03.15.05.	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.06.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
2.03.15.07.	Penyusunan rencana strategis
2.03.15.08.	Sosialisasi koversi minyak tanah ke LPG
2.03.15.09.	Eksplorasi pendahuluan sumber daya mineral
2.03.15.10.	Pengkajian hidrogeologi potensi air tanah
2.03.15.11.	Penyusunan rencana induk pertambangan
2.03.15.12.	Pengadaan alat berat bidang pertambangan
2.03.15.13.	Pendataan dan pemanfaatan air tanah
2.03.15.14.	pembuatan sumur eksplorasi (sumur uji)
2.03.15.15.	Kegiatan pendampingan dan pembinaan bidang sumberdaya air dan mineral
2.03.15.16.	Optimalisasi program CSR hulu migas
2.03.15.17.	dst.....
2.03.16.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
2.03.16.01.	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.03.16.02.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
2.03.16.03.	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi
2.03.16.04.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertambangan dan air tanah
2.03.16.05.	dst.....
2.03.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.17.01.	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
2.03.17.02.	Pelatihan pemeliharaan dan pengelolaan PLTS
2.03.17.03.	Peningkatan dan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
2.03.17.04.	Studi potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro
2.03.17.05.	Peningkatan dan pengadaan listrik pedesaan
2.03.17.06.	Peningkatan dan pengadaan penerangan jalan umum
2.03.17.07.	Perencanaan jaringan listrik dan trafo distribusi
2.03.17.08.	Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengadaan PLTS tersebar
2.03.17.09.	Pendataan ketenagalistrikan
2.03.17.10.	Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.03.17.11.	Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
2.03.17.12.	Penyediaan listrik rumah penduduk miskin
2.03.17.13.	Pendampingan pembentukan kelompok pengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat
2.03.17.14.	Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik perkantoran dan fasilitas umum
2.03.17.15.	dst.....
2.03.18.	Program Pengembangan Bidang Pertambangan Umum
2.03.18.01.	Evaluasi program CD, Lifting dan DBH migas
2.03.18.02.	dst.....
2.03.19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Minyak dan Gas
2.03.19.01.	Pendataan dan analisa kebutuhan BBM
2.03.19.02.	Laporan pengawasan distribusi dan tata niaga BBM
2.03.19.03.	dst.....
2.04.	PARIWISATA
2.04.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04.15.01.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2.04.15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04.15.03.	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
2.04.15.04.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04.15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
2.04.15.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04.15.07.	Pengembangan statistik kepariwisataan
2.04.15.08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu
2.04.15.09.	Sosialisasi permainan gasing nasional
2.04.15.10.	Boyolali fishing festival
2.04.15.11.	Pengadaan perlengkapan bahan-bahan promosi pariwisata
2.04.15.12.	Festival wisata bahari
2.04.15.13.	Festival permainan rakyat
2.04.15.14.	Familization trip on Boyolali
2.04.15.15.	Pembinaan sumber daya manusia bidang perhotelan, agen perjalanan dan pramu wisata
2.04.15.16.	Pameran Boyolali Expo
2.04.15.17.	Partisipasi parade tari daerah
2.04.15.18.	Pagelaran atraksi seni dan budaya
2.04.15.19.	Pendataan potensi wisata dan izin usaha pariwisata
2.04.15.20.	Pekan expo pariwisata
2.04.15.21.	dst.....
2.04.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04.16.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04.16.03.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2.04.16.04.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
2.04.16.05.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2.04.16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata
2.04.16.07.	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi
2.04.16.08.	Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan
2.04.16.09.	Pelaksanaan promosi atraksi kebudayaan dan pariwisata
2.04.16.10.	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang wisata bahari
2.04.16.11.	Pembangunan panggung atraksi budaya
2.04.16.12.	dst.....
2.04.17.	Program Pengembangan Kemitraan
2.04.17.01.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
2.04.17.02.	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
2.04.17.03.	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2.04.17.04.	Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
2.04.17.05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2.04.17.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2.04.17.07.	Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2.04.17.08.	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2.04.17.09.	Studi banding pengembangan desa wisata
2.04.17.10.	Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
2.04.17.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.04.17.15.	Pemilihan putri pariwisata daerah
2.04.17.16.	Pelatihan scuba diving
2.04.17.17.	Pendampingan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata
2.04.17.18.	Survey dan identifikasi objek wisata
2.04.17.19.	Pelatihan/kursus teknis kepariwisataan
2.04.17.20.	Pembinaan kelompok sadar wisata
2.04.17.21.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni pertunjukan
2.04.17.22.	dst.....
2.04.18.	Program Pengembangan Nilai Sejarah dan Budaya
2.04.18.01.	dst.....
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.15.01.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2.05.15.02.	Pengembangan/pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan penghuni perumahan rakyat
2.05.15.03.	Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.05.15.04.	Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3-K)
2.05.15.05.	Bantuan modal usaha bagi usaha nelayan miskin
2.05.15.06.	Penyusunan masterplan minapolitan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.05.15.07.	Pengembangan perikanan budidaya masyarakat pesisir
2.05.15.08.	Pendamping program pengentasan kemiskinan bagi nelayan miskin
2.05.15.09.	dst.....
2.05.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05.16.01.	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan
2.05.16.02.	Pendampingan operasional pokmaswas
2.05.16.03.	Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2.05.16.04.	Peningkatan kemampuan aparaturnya dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan
2.05.16.05.	Fasilitasi pengelolaan pelestarian terumbu karang
2.05.16.06.	Dana penunjang operasional kapal pengawas SDKP
2.05.16.07.	dst.....
2.05.17.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2.05.17.01.	Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut
2.05.17.02.	dst.....
2.05.18.	Program Peningkatan Mitigasi bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut
2.05.18.01.	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05.18.02.	dst.....
2.05.19.	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
2.05.19.01.	Penyuluhan budidaya kelautan
2.05.19.02.	dst.....
2.05.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05.20.01.	Pengembangan bibit ikan unggul
2.05.20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05.20.03.	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05.20.04.	Pengembangan BBIP
2.05.20.05.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan
2.05.20.06.	Pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan budidaya
2.05.20.07.	Pelatihan, pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
2.05.20.08.	dst.....
2.05.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2.05.21.02.	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2.05.21.03.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2.05.21.04.	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
2.05.21.05.	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2.05.21.06.	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2.05.21.07.	Study kelayakan (feasibility study) pelabuhan perikanan pantai
2.05.21.08.	Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	perikanan tangkap
2.05.21.09.	Penyusunan detail engginer design (DED) pelabuhan perikanan pantai
2.05.21.10.	Penyusunan dokumen lingkungan (UKL-UPL) pembangunan pelabuhan perikanan
2.05.21.11.	Bimbingan teknis penangkapan ikan di laut
2.05.21.12.	dst.....
2.05.22.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
2.05.22.01.	Kajian sistem penyuluhan perikanan
2.05.22.02.	Penyediaan sarana penyuluhan perikanan
2.05.22.03.	dst.....
2.05.23.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.23.01.	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.23.02.	Peningkatan kemampuan penerapan teknologi hasil perikanan
2.05.23.03.	Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan
2.05.23.04.	Pembangunan pabrik es
2.05.23.05.	Penyediaan bahan promosi dan produk perikanan
2.05.23.06.	Pelatihan teknis peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan
2.05.23.07.	Pengadaan alat pengolahan hasil perikanan
2.05.23.08.	Pelatihan peningkatan kemampuan pengolahan tongkol asap
2.05.23.09.	dst.....
2.05.24.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05.24.01.	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2.05.24.02.	Study kesesuaian pengembangan kawasan konservasi penyu
2.05.24.03.	Penunjang dan pendamping program coremap
2.05.24.04.	Fasilitasi pengembangan penangkaran penyu
2.05.24.05.	Penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
2.05.24.06.	dst.....
2.05.25.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal Komoditas Unggulan
2.05.25.01.	Pengembangan dan bimbingan teknis budidaya rumput laut
2.05.25.02.	Penyusunan master plan pengembangan rumput laut dan sosialisasi hasil pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut
2.05.25.03.	dst.....
2.05.26.	Program Pengawasan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.26.01.	Pengadaan perlengkapan sarana pos pengawas
2.05.26.02.	Fasilitasi tenaga pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
2.05.26.03.	dst.....
2.05.27.	Program Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.27.01.	Penunjang sarana site observasi kelautan dan perikanan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.05.27.02.	Pelatihan MPTK kelautan dan perikanan
2.05.27.03.	Inventarisasi ekosistem pesisir dan laut
2.05.27.04.	Pelatihan analisis data oceanografi dan ekosistem pesisir
2.05.27.05.	Identifikasi dan inventarisasi ekosistem pesisir
2.05.27.06.	Penyusunan profil desa pesisir dan pulau-pulau kecil
2.05.27.07.	Penyusunan sistem informasi sarana dan prasarana daerah
2.05.27.08.	dst.....
2.05.28.	Program Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.05.28.01.	Coral reef information and training center (CRITC) daerah
2.05.28.02.	Sosialisasi pengelolaan pelestarian ekosistem terumbu karang
2.05.28.03.	dst.....
2.05.29.	Pengembangan Data Informasi
2.05.29.01.	Perencanaan dan penyusunan program pengembangan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan
2.05.29.02.	dst.....
2.06.	PERDAGANGAN
2.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.15.01.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06.15.02.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06.15.03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06.15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah
2.06.15.05.	Sidang tera ulang kemetrolgian terhadap alat UTTP
2.06.15.06.	Pelaksanaan pengawasan sembako
2.06.15.07.	Pengadaan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolgian
2.06.15.08.	Monitoring dan pengawasan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
2.06.15.09.	Sosialisasi penyesuaian tarif
2.06.15.10.	dst.....
2.06.16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2.06.16.01.	Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
2.06.16.02.	Penyebarluasan informasi database kuota jenis barang dan jasa
2.06.16.03.	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2.06.16.04.	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
2.06.16.05.	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
2.06.16.06.	dst.....
2.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.17.01.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
2.06.17.02.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2.06.17.03.	Sosialisasi kebijakan penyerdehanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.06.17.04.	Pengembangan database informasi potensi unggulan
2.06.17.05.	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
2.06.17.06.	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
2.06.17.07.	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
2.06.17.08.	Membangun jejaring dengan eksportir
2.06.17.09.	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
2.06.17.10.	Pengembangan kluster produk ekspor
2.06.17.11.	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2.06.17.12.	Pembangunan promosi perdagangan internasional
2.06.17.13.	dst.....
2.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.18.01.	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.06.18.02.	Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha
2.06.18.03.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2.06.18.04.	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2.06.18.05.	Pengembangan pasar lelang daerah
2.06.18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06.18.07.	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2.06.18.08.	Pameran produk industri dan kerajinan
2.06.18.09.	Studi kelayakan pengembangan industri dan perdagangan rumput laut
2.06.18.10.	Workshop kebijakan perdagangan lintas batas dan temu pengusaha sektor perdagangan
2.06.18.11.	Pendataan kebutuhan bahan pokok masyarakat
2.06.18.12.	Desain engineering detail (DED) pasar
2.06.18.13.	Sosialisasi surat izin tempat usaha (SITU)
2.06.18.14.	Studi kelayakan pembangunan pasar
2.06.18.15.	Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
2.06.18.16.	Penyediaan sarana dan prasarana industri hulu rumput laut
2.06.18.17.	Sosialisasi undang-undang tentang sistem resi gudang
2.06.18.18.	Penyediaan showroom dan konter produk unggulan
2.06.18.19.	Monitoring dan penerbitan surat izin tempat usaha (SITU)
2.06.18.20.	Pembangunan pasar
2.06.18.21.	Festival kerajinan rakyat
2.06.18.22.	Pendidikan dan pelatihan bagi industri kecil
2.06.18.23.	Seminar dan temu bisnis produk unggulan
2.06.18.24.	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan perizinan di daerah
2.06.18.25.	dst.....
2.06.19.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.06.19.01.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
2.06.19.02.	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.06.19.03.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
2.06.19.04.	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
2.06.19.05.	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
2.06.19.06.	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan
2.06.20.	Program Pembangunan Tempat Usaha/Dagang
2.06.20.01.	dst.....
2.07.	INDUSTRI
2.07.15.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2.07.15.01.	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
2.07.15.02.	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
2.07.15.03.	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
2.07.15.04.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian, dan kualitas
2.07.15.05.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2.07.15.06.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.07.15.07.	dst.....
2.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.01.	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2.07.16.02.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2.07.16.03.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
2.07.16.04.	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2.07.16.05.	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2.07.16.06.	Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2.07.16.07.	Desain kemasan produk IKM
2.07.16.08.	Pelatihan penyyetaraan pengolahan produk pangan berbasis ikan
2.07.16.09.	Penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah
2.07.16.10.	Pelatihan pengembangan aneka olahan rumput laut
2.07.16.11.	Pelatihan pengembangan industri pengolahan minyak goreng
2.07.16.12.	Fasilitasi pendaftaran merk, halal dan N-IPRT
2.07.16.13.	Diversifikasi dan desain anyaman berbahan pandan
2.07.16.14.	Desain batik
2.07.16.15.	Pelatihan pengemasan produk industri bagi pelaku IKM dan aparatur
2.07.16.16.	Pelatihan pengelolaan pangan berbasis ikan
2.07.16.17.	Pembuatan industri produk dan kemasan
2.07.16.18.	Penyusunan profil industri kecil dan menengah
2.07.16.19.	Pelatihan pembuatan dodol
2.07.16.20.	dst.....
2.07.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1	2
2.07.17.01.	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07.17.02.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07.17.03.	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
2.07.17.04.	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
2.07.17.05.	dst.....
2.07.18.	Program Penataan Struktur Industri
2.07.18.01.	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
2.07.18.02.	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2.07.18.03.	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir
2.07.18.04.	dst.....
2.07.19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2.07.19.01.	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
2.07.19.02.	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat
2.07.19.03.	Studi kelayakan pengembangan industri dan perdagangan hasil kelautan dan perikanan
2.07.19.04.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam
2.07.19.05.	Pembangunan prasarana perdagangan
2.07.19.06.	Identifikasi dan sosialisasi pembangunan pabrik tapioka
2.07.19.07.	dst.....
2.08.	TRANSMIGRASI
2.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.08.15.01.	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2.08.15.02.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2.08.15.03.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2.08.15.04.	Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi
2.08.15.05.	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
2.08.15.06.	Pemukhtahiran sertifikasi lahan usaha II
2.08.15.07.	Pengadaan bibit, penanaman dan perawatan kelapa sawit
2.08.15.08.	Penyelesaian land clearing
2.08.15.09.	dst.....
2.08.16.	Program Transmigrasi Lokal
2.08.16.01.	Penyuluhan transmigrasi lokal
2.08.16.02.	Pelatihan transmigrasi lokal
2.08.16.03.	dst.....
2.08.17.	Program Transmigrasi Regional
2.08.17.01.	Penyuluhan transmigrasi regional
2.08.17.02.	Pelatihan transmigrasi regional
2.08.17.03.	dst.....

I. KODE REKENING BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 DAFTAR KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5	BELANJA
5.1.	Belanja Tidak Langsung
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.	Gaji pokok PNS/uang representasi 1)
5.1.1.01.02.	Tunjangan keluarga
5.1.1.01.03.	Tunjangan jabatan 1)
5.1.1.01.04.	Tunjangan fungsional
5.1.1.01.05.	Tunjangan fungsional umum
5.1.1.01.06.	Tunjangan beras 1)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus
5.1.1.01.08.	Pembulatan gaji
5.1.1.01.09.	Iuran asuransi kesehatan
5.1.1.01.10.	Uang paket 2)
5.1.1.01.11.	Tunjangan panitia musyawarah 2)
5.1.1.01.12.	Tunjangan komisi 2)
5.1.1.01.13.	Tunjangan panitia anggaran 2)
5.1.1.01.14.	Tunjangan badan kehormatan 2)
5.1.1.01.15.	Tunjangan alat kelengkapan lainnya 2)
5.1.1.01.16.	Tunjangan perumahan 2)
5.1.1.01.17.	Uang duka wafat/tewas 2)
5.1.1.01.18.	Uang jasa pengabdian 2)
5.1.1.01.19.	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD
5.1.1.01.20.	Tunjangan kesehatan DPRD
5.1.1.01.21.	Tunjangan umum
5.1.1.01.22.	Dst.....
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.02.	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04.	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5.1.1.02.07.	Dst.....
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01.	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
5.1.1.03.02.	Belanja penunjang operasional KDH/WKDH
5.1.1.03.03.	Dst.....

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak
5.1.1.04.01.	Biaya pemungutan PBB
5.1.1.04.02.	Dst.....
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01.	Insentif pemungutan pajak daerah
5.1.1.05.02.	Dst.....
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01.	Insentif pemungutan retribusi daerah
5.1.1.06.02.	Dst.....
5.1.2.	Belanja Bunga
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01.	Bunga utang pinjaman kepada pemerintah
5.1.2.01.02.	Bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya
5.1.2.01.03.	Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank
5.1.2.01.04.	Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank
5.1.2.01.05.	Dst.....
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01.	Bunga utang obligasi
5.1.2.02.02.	Dst.....
5.1.3.	Belanja Subsidi
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01.	Belanja subsidi kepada perusahaan
5.1.3.01.02.	Belanja subsidi kepada lembaga pendidikan
5.1.3.01.03.	Dst.....
5.1.3.02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan
5.1.3.02.01.	Belanja subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM)
5.1.3.02.02.	Dst.....
5.1.4.	Belanja Hibah
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01.	Pemerintah pusat
5.1.4.01.02.	Dst.....
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 3)
5.1.4.02.01.	Pemerintah provinsi
5.1.4.02.02.	Dst.....
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa
5.1.4.03.01.	Pemerintahan desa
5.1.4.03.02.	Dst.....
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
5.1.4.04.01.	Perusahaan daerah/ BUMD/ BUMN
5.1.4.04.02.	Dst.....
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5.1.4.05.01.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan
5.1.4.05.02.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga
5.1.4.05.03.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kesenian dan kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.1.4.05.04.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kewanitaan
5.1.4.05.05.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang profesi
5.1.4.05.06.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang non profesi
5.1.4.05.07.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan
5.1.4.05.08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian
5.1.4.05.09.	Dst.....
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Masyarakat
5.1.4.06.01.	Belanja hibah kepada masyarakat
5.1.4.06.02.	Dst.....
5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.07.01.	Belanja hibah dana BOS ke SD swasta
5.1.4.07.02.	Belanja hibah dana BOS ke SMP swasta
5.1.4.07.03.	Dst.....
5.1.4.08.	Belanja Hibah DAK
5.1.4.08.01.	Belanja hibah DAK
5.1.4.08.02.	Dst.....
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat
5.1.5.01.01.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk rehabilitasi sosial
5.1.5.01.02.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial
5.1.5.01.03.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk pemberdayaan sosial
5.1.5.01.04.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk jaminan sosial
5.1.5.01.05.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan kemiskinan
5.1.5.01.06.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan bencana
5.1.5.01.07.	Dst.....
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.01.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk rehabilitasi sosial
5.1.5.02.02.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk perlindungan sosial
5.1.5.02.03.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pemberdayaan sosial
5.1.5.02.04.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk jaminan sosial
5.1.5.02.05.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan
5.1.5.02.06.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan bencana
5.1.5.02.07.	Dst.....
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.01.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
	rehabilitasi sosial
5.1.5.03.02.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk perlindungan sosial
5.1.5.03.03.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk pemberdayaan sosial
5.1.5.03.04.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial
5.1.5.03.05.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan
5.1.5.03.06.	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk penanggulangan bencana
5.1.5.03.07.	Dst.....
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi
5.1.6.01.01.	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi
5.1.6.01.02.	Dst.....
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01.	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota
5.1.6.02.02.	Dst.....
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
5.1.6.03.01.	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
5.1.6.03.02.	Dst.....
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01.	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota
5.1.6.04.02.	Dst.....
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
5.1.6.05.01.	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa
5.1.6.05.02.	Dst.....
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5.1.7.01.02.	Dst.....
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.02.01.	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota
5.1.7.02.02.	Dst.....
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01.	Belanja bantuan keuangan kepada desa
5.1.7.03.02.	Dst.....
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
5.1.7.04.01.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi
5.1.7.04.02.	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota
5.1.7.04.03.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
5.1.7.04.04.	Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat
5.1.7.04.05.	Dst.....
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.1.7.05.01.	Belanja bantuan kepada partai politik
5.1.7.05.02.	Dst.....
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.01.	Belanja tidak terduga
5.1.8.01.02.	Dst.....
5.2.	Belanja Langsung
5.2.1.	Belanja Pegawai
5.2.1.01.	Honorarium PNS
5.2.1.01.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
5.2.1.01.03.	Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan
5.2.1.01.04.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
5.2.1.01.05.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/ fasilitator PNS
5.2.1.01.06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan
5.2.1.01.07.	Dst.....
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
5.2.1.02.02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03.	Honorarium staf administrasi kegiatan
5.2.1.02.04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan
5.2.1.02.05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5.2.1.02.06.	Dst.....
5.2.1.03.	Uang Lembur
5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS
5.2.1.03.02.	Uang lembur non PNS
5.2.1.03.03.	Dst.....
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.04.01.	Honorarium pengelolaan dana BOS
5.2.1.04.02.	Dst.....
5.2.1.05.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
5.2.1.05.03.	Dst.....
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD
5.2.1.06.01.	Belanja pegawai BLUD
5.2.1.06.02.	Dst.....
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.	Belanja dokumentasi/administrasi tender
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak/gas

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.	Belanja spanduk
5.2.2.01.10.	Belanja dekorasi
5.2.2.01.11.	Dst.....
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06.	Belanja bahan alat-alat olahraga
5.2.2.02.07.	Belanja alat perlengkapan
5.2.2.02.08.	Belanja material/hadiah
5.2.2.02.09.	Dst.....
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.	Belanja air
5.2.2.03.02.	Belanja telepon
5.2.2.03.03.	Belanja listrik
5.2.2.03.04.	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.	Belanja sertifikasi
5.2.2.03.09.	Belanja jasa transaksi keuangan
5.2.2.03.10.	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum
5.2.2.03.11.	Belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
5.2.2.03.12.	Belanja jasa penghargaan/prestasi
5.2.2.03.13.	Belanja jasa medis/laboratorium
5.2.2.03.14.	Belanja jasa kebersihan
5.2.2.03.15.	Belanja jasa kesenian
5.2.2.03.16.	Belanja jasa administrasi
5.2.2.03.17.	Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.18.	Belanja jasa notaries
5.2.2.03.19.	Belanja jasa humas
5.2.2.03.20.	Belanja jasa protokol
5.2.2.03.21.	Belanja jasa keamanan
5.2.2.03.22.	Belanja perangkat lunak (software)
5.2.2.03.23.	Belanja jasa pengolahan data
5.2.2.03.24.	Belanja upah
5.2.2.03.25.	Dst.....
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.	Belanja premi asuransi kesehatan 2)
5.2.2.04.02.	Belanja premi asuransi barang milik daerah
5.2.2.04.03.	Dst.....

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.	Belanja jasa service
5.2.2.05.02.	Belanja penggantian suku cadang
5.2.2.05.03.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5.2.2.05.04.	Belanja jasa KIR
5.2.2.05.05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan surat izin mengemudi
5.2.2.05.07.	Dst.....
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.	Belanja cetak
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan
5.2.2.06.03.	Belanja dokumentasi
5.2.2.06.04.	Dst.....
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05.	Dst.....
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.	Belanja sewa sarana mobilitas darat
5.2.2.08.02.	Belanja sewa sarana mobilitas air
5.2.2.08.03.	Belanja sewa sarana mobilitas udara
5.2.2.07.04.	Dst.....
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01.	Belanja sewa eskavator
5.2.2.09.02.	Belanja sewa bulldoser
5.2.2.09.03.	Belanja sewa bomag, loader, beco loader, hydro trailer, graider
5.2.2.09.04.	Dst.....
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.	Belanja sewa peralatan sound sistem
5.2.2.10.08.	Belanja sewa peralatan survey
5.2.2.10.09.	Belanja sewa perlengkapan media peliputan acara
5.2.2.10.10.	Dst.....
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.11.07.	Dst.....
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01.	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)
5.2.2.12.03.	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)
5.2.2.12.04.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)
5.2.2.12.05.	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)
5.2.2.12.06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)
5.2.2.12.07.	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)
5.2.2.12.08.	Belanja atribut
5.2.2.12.09.	Dst.....
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.02.	Belanja pakaian dinas non PNS
5.2.2.13.03.	Dst.....
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian muslim
5.2.2.14.06.	Belanja pakaian seragam
5.2.2.14.07.	Belanja pakaian kegiatan
5.2.2.14.08.	Dst.....
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.15.04.	Dst.....
5.2.2.16.	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.16.05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis
5.2.2.16.06.	Belanja pendidikan PNS ikatan dinas
5.2.2.16.07.	Dst.....
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03.	Belanja kontribusi diklat teknis/fungsional
5.2.2.17.04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya
5.2.2.17.05.	Belanja penelitian dan studi
5.2.2.17.06.	Belanja kontribusi diklat struktural

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.2.17.07.	Dst.....
5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.18.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.18.03.	Dst.....
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.19.02.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.19.04.	Dst.....
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.	Belanja pemeliharaan jalan
5.2.2.20.02.	Belanja pemeliharaan jembatan
5.2.2.20.03.	Belanja pemeliharaan bangunan
5.2.2.20.04.	Belanja pemeliharaan jaringan
5.2.2.20.05.	Belanja pemeliharaan peralatan
5.2.2.20.06.	Belanja pemeliharaan objek dan daya tarik wisata
5.2.2.20.07.	Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software)
5.2.2.20.08.	Belanja pemeliharaan lahan
5.2.2.20.09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan
5.2.2.20.10.	Dst.....
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi
5.2.2.21.01.	Belanja jasa konsultasi penelitian
5.2.2.21.02.	Belanja jasa konsultasi perencanaan
5.2.2.21.03.	Belanja jasa konsultasi pengawasan
5.2.2.21.04.	Belanja jasa konsultasi manajemen
5.2.2.21.05.	Belanja jasa konsultasi IT
5.2.2.21.06.	Belanja jasa konsultasi keuangan
5.2.2.21.07.	Belanja jasa konsultasi hukum
5.2.2.21.08.	Dst.....
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.22.01.	Belanja barang BOS
5.2.2.22.02.	Dst.....
5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
5.2.2.23.02.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
5.2.2.23.03.	Dst.....
5.2.2.24.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.24.01.	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat
5.2.2.24.02.	Belanja barang yang akan dijual pihak ketiga
5.2.2.24.03.	Dst.....
5.2.2.25.	Belanja Barang Dana BROS
5.2.2.25.01.	Belanja barang BROS
5.2.2.25.02.	Dst.....
5.2.2.26.	Belanja Honorarium PNS

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.2.26.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS
5.2.2.26.02.	Dst.....
5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non PNS
5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
5.2.2.27.02.	Dst.....
5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.28.01.	Belanja barang dan jasa BLUD
5.2.2.28.02.	Dst.....
5.2.2.29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.2.29.02.	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
5.2.2.29.03.	Dst.....
5.2.3.	Belanja Modal
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.	Belanja modal pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02.	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03.	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04.	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10.	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11.	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12.	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22.	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.01.23.	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24.	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25.	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26.	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27.	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28.	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29.	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30.	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31.	Belanja modal pengadaan tanah fasilitas umum dan sosial
5.2.3.01.32.	Dst.....
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01.	Belanja modal pengadaan traktor
5.2.3.02.02.	Belanja modal pengadaan buldozer
5.2.3.02.03.	Belanja modal pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04.	Belanja modal pengadaan eskavator
5.2.3.02.05.	Belanja modal pengadaan dump truck
5.2.3.02.06.	Belanja modal pengadaan crane
5.2.3.02.07.	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08.	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09.	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.3.02.10.	Belanja modal pengadaan beco loader
5.2.3.02.11.	Belanja modal pengadaan mesin pemecah batu (stone crusher)
5.2.3.02.12.	Belanja modal pengadaan mesin pompong/kapal
5.2.3.02.13.	Dst.....
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak dan tinja)
5.2.3.03.08.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
	bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.03.14.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15.	Dst.....
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.	Belanja modal pengadaan gerobak
5.2.3.04.02.	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03.	Belanja modal pengadaan becak
5.2.3.04.04.	Belanja modal pengadaan sepeda
5.2.3.04.05.	Belanja modal pengadaan karavan
5.2.3.04.06.	Dst.....
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
5.2.3.05.01.	Belanja modal pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02.	Belanja modal pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03.	Belanja modal pengadaan speed boat
5.2.3.05.04.	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05.	Belanja modal pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06.	Belanja modal pengadaan jet foil
5.2.3.05.07.	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08.	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09.	Belanja modal pengadaan kapal kargo
5.2.3.05.10.	Dst.....
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01.	Belanja modal pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02.	Belanja modal pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03.	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04.	Belanja modal pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05.	Belanja modal pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06.	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
5.2.3.06.07.	Dst.....
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01.	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02.	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03.	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04.	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05.	Belanja modal pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06.	Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi
5.2.3.07.07.	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.07.08.	Dst.....
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01.	Belanja modal pengadaan mesin las
5.2.3.08.02.	Belanja modal pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03.	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.08.04.	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05.	Belanja modal pengadaan mesin generator
5.2.3.08.06.	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel
5.2.3.08.07.	Dst.....
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01.	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02.	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03.	Belanja modal pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04.	Belanja modal pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05.	Belanja modal pengadaan mesin potong
5.2.3.09.06.	Belanja modal pengadaan pompa air
5.2.3.09.07.	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan
5.2.3.09.08.	Belanja modal pengadaan alat pengemas rumput laut
5.2.3.09.09.	Belanja modal pengadaan mesin kompos
5.2.3.09.10.	Dst.....
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.	Belanja modal pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.	Belanja modal pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.05.	Belanja modal pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06.	Belanja modal pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07.	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.09.	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan
5.2.3.10.13.	Belanja modal pengadaan mesin absensi
5.2.3.10.14.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
5.2.3.10.15.	Belanja modal pengadaan mesin perforasi
5.2.3.10.16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu
5.2.3.10.17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor
5.2.3.10.18.	Belanja modal pengadaan teropong
5.2.3.10.19.	Belanja modal pengadaan mesin laminating
5.2.3.10.20.	Belanja modal pengadaan kipas angin
5.2.3.10.21.	Belanja modal pengadaan TV
5.2.3.10.22.	Dst.....
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.01.	Belanja modal pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02.	Belanja modal pengadaan almari
5.2.3.11.03.	Belanja modal pengadaan brankas
5.2.3.11.04.	Belanja modal pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05.	Belanja modal pengadaan white board
5.2.3.11.06.	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07.	Belanja modal pengadaan hiasan ruang kantor
5.2.3.11.08.	Belanja modal pengadaan papan pengumuman
5.2.3.11.09.	Belanja modal pengadaan gerobak

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.11.10.	Belanja modal pengadaan tenda
5.2.3.11.11.	Belanja modal pengadaan papan struktur
5.2.3.11.12.	Dst.....
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/ server
5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer
5.2.3.12.05.	Belanja modal pengadaan scanner
5.2.3.12.06.	Belanja modal pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07.	Belanja modal pengadaan CPU
5.2.3.12.08.	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.11.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer
5.2.3.12.12.	Dst.....
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01.	Belanja modal pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02.	Belanja modal pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03.	Belanja modal pengadaan meja makan
5.2.3.13.04.	Belanja modal pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05.	Belanja modal pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06.	Belanja modal pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07.	Belanja modal pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08.	Belanja modal pengadaan sofa
5.2.3.13.09.	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10.	Belanja modal pengadaan kursi sekolah
5.2.3.13.11.	Belanja modal pengadaan meja sekolah
5.2.3.13.12.	Belanja modal pengadaan meja resepsionis
5.2.3.13.13.	Belanja modal pengadaan kursi tunggu
5.2.3.13.14.	Dst.....
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01.	Belanja modal pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02.	Belanja modal pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03.	Belanja modal pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04.	Belanja modal pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.	Belanja modal pengadaan kulkas
5.2.3.14.06.	Belanja modal pengadaan rak piring
5.2.3.14.07.	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.14.08.	Belanja modal pengadaan vacum cleaner
5.2.3.14.09.	Dst.....
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.	Belanja modal pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02.	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan karpet

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.15.04.	Belanja modal pengadaan gorden/tirai
5.2.3.15.05.	Dst.....
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.	Belanja modal pengadaan kamera
5.2.3.16.02.	Belanja modal pengadaan handycam
5.2.3.16.03.	Belanja modal pengadaan proyektor
5.2.3.16.04.	Belanja modal pengadaan tape
5.2.3.16.05.	Belanja modal pengadaan sound system
5.2.3.16.06.	Belanja modal pengadaan alat perekam
5.2.3.16.07.	Belanja modal pengadaan megaphone
5.2.3.16.08.	Dst.....
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.	Belanja modal pengadaan telepon
5.2.3.17.02.	Belanja modal pengadaan faximili
5.2.3.17.03.	Belanja modal pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04.	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)
5.2.3.17.05.	Belanja modal pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06.	Belanja modal pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07.	Belanja modal pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08.	Belanja modal pengadaan peralatan internet wireless
5.2.3.17.09.	Dst.....
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.	Belanja modal pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.	Belanja modal pengadaan teodolite
5.2.3.18.03.	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04.	Belanja modal pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05.	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.06.	Belanja modal pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07.	Belanja modal pengadaan barometer
5.2.3.18.08.	Belanja modal pengadaan seismograph
5.2.3.18.09.	Belanja modal pengadaan ultrasonograph
5.2.3.18.10.	Belanja modal pengadaan spectrofotometer
5.2.3.18.11.	Belanja modal pengadaan turbidity meter
5.2.3.18.12.	Belanja modal pengadaan current meter
5.2.3.18.13.	Belanja modal pengadaan alat ukur digital
5.2.3.18.14.	Belanja modal pengadaan alat ukur panjang
5.2.3.18.15.	Belanja modal pengadaan alat ukur volume
5.2.3.18.16.	Dst.....
5.2.3.19.	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.05.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.19.08.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.3.19.12.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13.	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14.	Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
5.2.3.19.15.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran fisioterapi
5.2.3.19.16.	Dst.....
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.20.05.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium penguji kualitas air
5.2.3.20.10.	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
5.2.3.20.11.	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan
5.2.3.20.12.	Dst.....
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.21.02.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.21.04.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis hotmix
5.2.3.21.05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan lapis penetrasi macadam
5.2.3.21.06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan beton bertulang
5.2.3.21.07.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan semen
5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan tanah
5.2.3.21.09.	Dst.....
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02.	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan orang
5.2.3.22.04.	Belanja modal pengadaan konstruksi penyebrangan diatas air
5.2.3.22.05.	Dst.....
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02.	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03.	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.23.04.	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07.	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi timbunan
5.2.3.23.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase
5.2.3.23.11.	Belanja modal pengadaan konstruksi kolam
5.2.3.23.12.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan limbah
5.2.3.23.13.	Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi jaringan air
5.2.3.23.14.	Dst.....
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01.	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02.	Belanja modal pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan hutan kota
5.2.3.24.04.	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan
5.2.3.24.05.	Dst.....
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02.	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03.	Belanja modal pengadaan pembangkit listrik
5.2.3.25.04.	Dst.....
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
5.2.3.26.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan
5.2.3.26.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pelabuhan/tambatan perahu
5.2.3.26.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung/tempat
5.2.3.26.10.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bandar udara
5.2.3.26.11.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tugu batas/patok batas
5.2.3.26.12.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya
5.2.3.26.13.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian partisi ruangan

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.26.14.	Dst.....
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.	Belanja modal pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02.	Belanja modal pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03.	Belanja modal pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04.	Belanja modal pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05.	Belanja modal pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06.	Belanja modal pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07.	Belanja modal pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08.	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09.	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10.	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11.	Belanja modal pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12.	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.2.3.27.14.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15.	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17.	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18.	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
5.2.3.27.19.	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21.	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22.	Belanja modal pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23.	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)
5.2.3.27.24.	Belanja modal pengadaan mikrofilm
5.2.3.27.25.	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe
5.2.3.27.26.	Belanja modal pengadaan buku novel
5.2.3.27.27.	Belanja modal pengadaan buku masakan
5.2.3.27.28.	Dst.....
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28.01.	Belanja modal pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.02.	Belanja modal pengadaan patung
5.2.3.28.03.	Belanja modal pengadaan ukiran
5.2.3.28.04.	Belanja modal pengadaan pahatan
5.2.3.28.05.	Belanja modal pengadaan batu alam
5.2.3.28.06.	Belanja modal pengadaan maket/miniatur/diorama
5.2.3.28.07.	Belanja modal pengadaan alat musik
5.2.3.28.08.	Belanja modal pengadaan alat kesenian
5.2.3.28.09.	Belanja modal pengadaan benda-benda budaya
5.2.3.28.10.	Dst.....
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.01.	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
5.2.3.29.02.	Belanja modal pengadaan ternak
5.2.3.29.03.	Belanja modal pengadaan tanaman
5.2.3.29.04.	Dst.....
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.30.01.	Belanja modal pengadaan senjata api
5.2.3.30.02.	Belanja modal pengadaan radar
5.2.3.30.03.	Belanja modal pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04.	Belanja modal pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet
5.2.3.30.06.	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
5.2.3.30.07.	Belanja modal pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08.	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal pengadaan pentungan
5.2.3.30.10.	Belanja modal pengadaan helm
5.2.3.30.11.	Belanja modal pengadaan alarm/sirene
5.2.3.30.12.	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
5.2.3.30.13.	Dst.....
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.31.01.	Belanja modal dana BOS
5.2.3.31.02.	Dst.....
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
5.2.3.32.01.	Belanja modal pengadaan finger scan
5.2.3.32.02.	Belanja modal pengadaan papan reklame/iklan
5.2.3.32.03.	Belanja modal pengadaan marka/rambu-rambu
5.2.3.32.04.	Belanja modal pengadaan alat ID Card
5.2.3.32.05.	Belanja modal pengadaan besi baleho
5.2.3.32.06.	Belanja modal pengadaan kasur
5.2.3.32.07.	Belanja modal pengadaan alat pengolahan arsip
5.2.3.32.08.	Belanja modal pengadaan jaringan TV kabel
5.2.3.32.09.	Belanja modal pengadaan alat-alat selam
5.2.3.32.10.	Belanja modal pengadaan teralis
5.2.3.32.11.	Dst.....
5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD
5.2.3.33.01.	Belanja modal BLUD
5.2.3.33.02.	Dst.....

J. DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
6	PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.1.01.01.	Pajak daerah
6.1.1.01.02.	Retribusi daerah
6.1.1.01.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah
6.1.1.01.05.	Dst.....
6.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01.	Bagi hasil pajak
6.1.1.02.02.	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam
6.1.1.02.03.	Dst.....
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6.1.1.04.01.	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung
6.1.1.04.02.	Belanja pegawai dari belanja langsung
6.1.1.04.03.	Belanja barang dan jasa
6.1.1.04.04.	Belanja modal
6.1.1.04.05.	Belanja bunga
6.1.1.04.06.	Belanja subsidi
6.1.1.04.07.	Belanja hibah
6.1.1.04.08.	Belanja bantuan social
6.1.1.04.09.	Belanja bagi hasil
6.1.1.04.10.	Belanja bantuan keuangan
6.1.1.04.11.	Belanja tidak terduga
6.1.1.04.12.	Dst.....
6.1.1.05.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6.1.1.05.01.	Uang jaminan
6.1.1.05.02.	Potongan taspen
6.1.1.05.03.	Potongan beras
6.1.1.05.04.	Askes
6.1.1.05.05.	Dst.....
6.1.1.06.	Kegiatan Lanjutan
6.1.1.06.01.	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.02.	Dst.....
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01.	Pencairan dana cadangan nomor
6.1.2.01.02.	Dst.....
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
6.1.3.01.01.	BUMD
6.1.3.01.02.	Dst.....
6.1.3.02.	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah Yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga
6.1.3.02.01.	Dst.....
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01.	Bank
6.1.4.01.02.	Dst.....
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya
6.1.4.02.01.	Pemerintah daerah
6.1.4.02.02.	Dst.....
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6.1.4.03.01.	Bank
6.1.4.03.02.	Dst.....
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.4.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.02.	Dst.....
6.1.4.05.	Penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah
6.1.4.05.01.	Obligasi atas nama pemerintah daerah
6.1.4.05.02.	Obligasi nomor
6.1.4.05.03.	Dst.....
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.5.01.01.	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman
6.1.5.01.02.	Dst.....
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah
6.1.6.01.	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.01.04.	Dst.....
6.1.6.02.	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.02.02.	Dst.....
6.1.6.03.	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah
6.1.6.03.02.	Dst.....
6.1.6.04.	Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6.1.6.04.01.	Bank
6.1.6.04.02.	Dst.....
6.1.6.05.	Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.02.	Dst.....
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01.	Pembentukan dana cadangan
6.2.1.01.02.	Dst.....
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01.	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01.	BUMN
6.2.2.01.02.	Dst.....
6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.2.2.02.01.	PT. BANK RIAUKEPRI
6.2.2.02.02.	PT. RAL
6.2.2.02.03.	Perusda
6.2.2.02.04.	Dst.....
6.2.2.03.	Badan Usaha Milik Swasta
6.2.2.03.01.	Badan...
6.2.2.03.02.	Dst.....
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang
6.2.3.01.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman
6.2.3.01.02.	Dst.....
6.2.3.02.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah
6.2.3.02.02.	Dst.....
6.2.3.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.03.01.	Bank
6.2.3.03.02.	Dst.....
6.2.3.04.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.04.02.	Dst.....
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman
6.2.3.05.02.	Dst.....
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lainnya
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah
6.2.3.06.02.	Dst.....
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.07.01.	Bank
6.2.3.07.02.	Dst.....
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.02.	Dst.....

KODE REKENING	URAIAN REKENING
1	2
6.2.3.09.	Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama pemerintah daerah
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor
6.2.3.09.03.	Dst.....
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.01.	Obligasi atas nama pemerintah
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor
6.2.3.10.03.	Dst.....
6.2.3.11.	Pembayaran hutang jangka pendek
6.2.3.11.01.	Pembayaran hutang jangka pendek
6.2.3.11.02.	Dst.....
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6.2.4.01.01.	Penerusan pinjaman
6.2.4.01.02.	Dst.....
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6.2.4.02.02.	Pemerintah daerah
6.2.4.02.03.	Dst.....
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1.01.01.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
6.3.1.01.02.	Dst.....

K. FORMAT KEBIJAKAN UMUM APBD

KABUPATEN BOYOLALI KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 20XX

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- I.2 Tujuan penyusunan KUA; dan
- I.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya;
- 2.2 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- Laju Inflasi;
- Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
- Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS)

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- Pendapatan Daerah
 - Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;
 - Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
- Belanja Daerah
 - Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
 - Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;
 - Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

- Kebijakan belanja berdasarkan :
 - urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)
 - satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
- Pembiayaan Daerah
 - kebijakan penerimaan pembiayaan;
 - kebijakan pengeluaran pembiayaan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

....., tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

L. FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

KABUPATEN BOYOLALI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 20XX

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

Tabel

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah		
1.1	Pajak Daerah		
1.2	Retribusi Daerah		
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
2	Dana Perimbangan		
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
2.2	Dana Alokasi Umum		
2.3	Dana Alokasi Khusus		
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
3.1	Hibah		
3.2	Dana Darurat		
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		

3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			
	Penerimaan pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
	Pencairan dana cadangan		
	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	Penerimaan pinjaman daerah		
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	Penerimaan piutang daerah		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
JUMLAH DANA TERSEDIA			

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Matriks Prioritas Pembangunan

NO.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1.	<u>Contoh :</u> Penanggulangan Kemiskinan	<u>Contoh :</u> Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga prosentase penduduk miskin dapat mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007	<u>Contoh :</u> 1. Dinas Sosial; 2. Dinas PMD; 3. Dinas kesehatan;	<u>Contoh :</u> Pemberdayaan Fakir Miskin
2.				
3.				
Dst.				
JUMLAH				

Catatan:

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

V.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

URUSAN/SKPD		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)	KET.
	2	3	4
	URUSAN WAJIB		
1	Pendidikan		
1.1	Dinas/Badan/Kantor		
1.2	Dst.....		
2	Kesehatan		
2.1	Dinas/Badan/Kantor		
2.2	Dst.....		
3	Pekerjaan Umum		
3.1	Dinas/Badan/Kantor		
3.2	Dst.....		
4	Perumahan		
4.1	Dinas/Badan/Kantor		
4.2	Dst.....		
5	Penataan Ruang		
5.1	Dinas/Badan/Kantor		
5.2	Dst.....		
6	Perencanaan Pembangunan		
6.1	Dinas/Badan/Kantor		
6.2	Dst.....		
7	Perhubungan		
7.1	Dinas/Badan/Kantor		
7.2	Dst.....		
8	Lingkungan Hidup		
8.1	Dinas/Badan/Kantor		
8.2	Dst.....		
9	Pertanahan		
9.1	Dinas/Badan/Kantor		
9.2	Dst.....		

10	Kependudukan dan Catatan Sipil		
10.1	Dinas/Badan/Kantor		
10.2	Dst.....		
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
11.1	Dinas/Badan/Kantor		
11.2	Dst.....		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Dinas/Badan/Kantor		
12.2	Dst.....		
13	Sosial		
13.1	Dinas/Badan/Kantor		
13.2	Dst.....		
14	Ketenagakerjaan		
14.1	Dinas/Badan/Kantor		
14.2	Dst.....		
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
15.1	Dinas/Badan/Kantor		
15.2	Dst.....		
16	Penanaman Modal		
16.1	Dinas/Badan/Kantor		
16.2	Dst.....		
17	Kebudayaan		
17.1	Dinas/Badan/Kantor		
17.2	Dst.....		
18	Pemuda dan Olah Raga		
18.1	Dinas/Badan/Kantor		
18.2	Dst.....		
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
19.1	Dinas/Badan/Kantor		
19.2	Dst.....		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
20.1	Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/ Inspektorat		
20.2	Dst.....		

21	Ketahanan Pangan		
21.1	Dinas/Badan/Kantor		
21.2	Dst.....		
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
22.1	Dinas/Badan/Kantor		
22.2	Dst.....		
23	Statistik		
23.1	Dinas/Badan/Kantor		
23.2	Dst.....		
24	Kearsipan		
24.1	Dinas/Badan/Kantor		
24.2	Dst.....		
25	Komunikasi dan Informatika		
25.1	Dinas/Badan/Kantor		
25.2	Dst.....		
26	Perpustakaan		
26.1	Dinas/Badan/Kantor		
26.2	Dst.....		
	URUSAN PILIHAN		
1	Pertanian		
1.1	Dinas/Badan/Kantor		
1.2	Dst.....		
2	Kehutanan		
2.1	Dinas/Badan/Kantor		
2.2	Dst.....		
3	Energi dan Sumberdaya Mineral		
3.1	Dinas/Badan/Kantor		
3.2	Dst.....		
4	Pariwisata		
4.1	Dinas/Badan/Kantor		
4.2	Dst.....		
5	Kelautan dan Perikanan		
5.1	Dinas/Badan/Kantor		
5.2	Dst.....		
6	Perdagangan		
6.1	Dinas/Badan/Kantor		
6.2	Dst.....		
7	Industri		
7.1	Dinas/Badan/Kantor		
7.2	Dst.....		

8	Ketransmigrasian		
8.1	Dinas/Badan/Kantor		
8.2	Dst.....		

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan
Tahun Anggaran

Urusan :

SKPD :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3	4	5
01	Program A			
02	Program B			
03	Program C			
04	Program D			
05	Program dst			

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel IV.3

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	
2	Belanja Bunga	
3	Belanja Subsidi	
4	Belanja Hibah	
5	Belanja Bantuan Sosial	
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
8	Belanja Tidak Terduga	

BAB IV. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1.2	Pencairan dana cadangan	
1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
2	Pengeluaran pembiayaan	
2.1	Pembentukan dana cadangan	
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	
2.3	Pembayaran pokok utang	
2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan neto	

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPA.

....., tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

M. FORMAT NOTA KESEPAKATAN

1. FORMAT NOTA KESEPAKATAN KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Bupati Boyolali
- Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali

- a. Nama :
- Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

- b. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

- c. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kabupaten Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

....., tanggal

BUPATI BOYOLALI

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

selaku,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

2. FORMAT NOTA KESEPAKATAN PPAS

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Boyolali

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Bupati Boyolali
- Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali

- a. Nama :
- Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

- b. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

- c. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA., para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

....., tanggal

BUPATI Boyolali

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN Boyolali

selaku,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

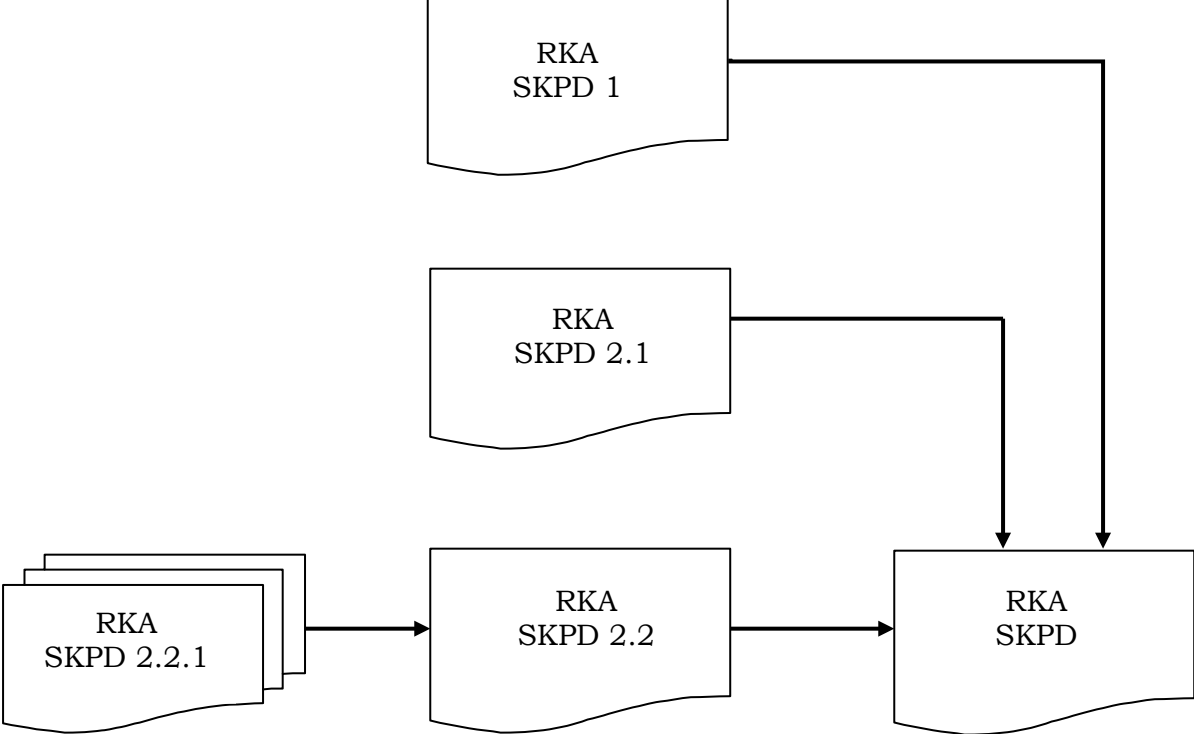
(nama lengkap)
WAKIL KETUA

(tanda tangan)

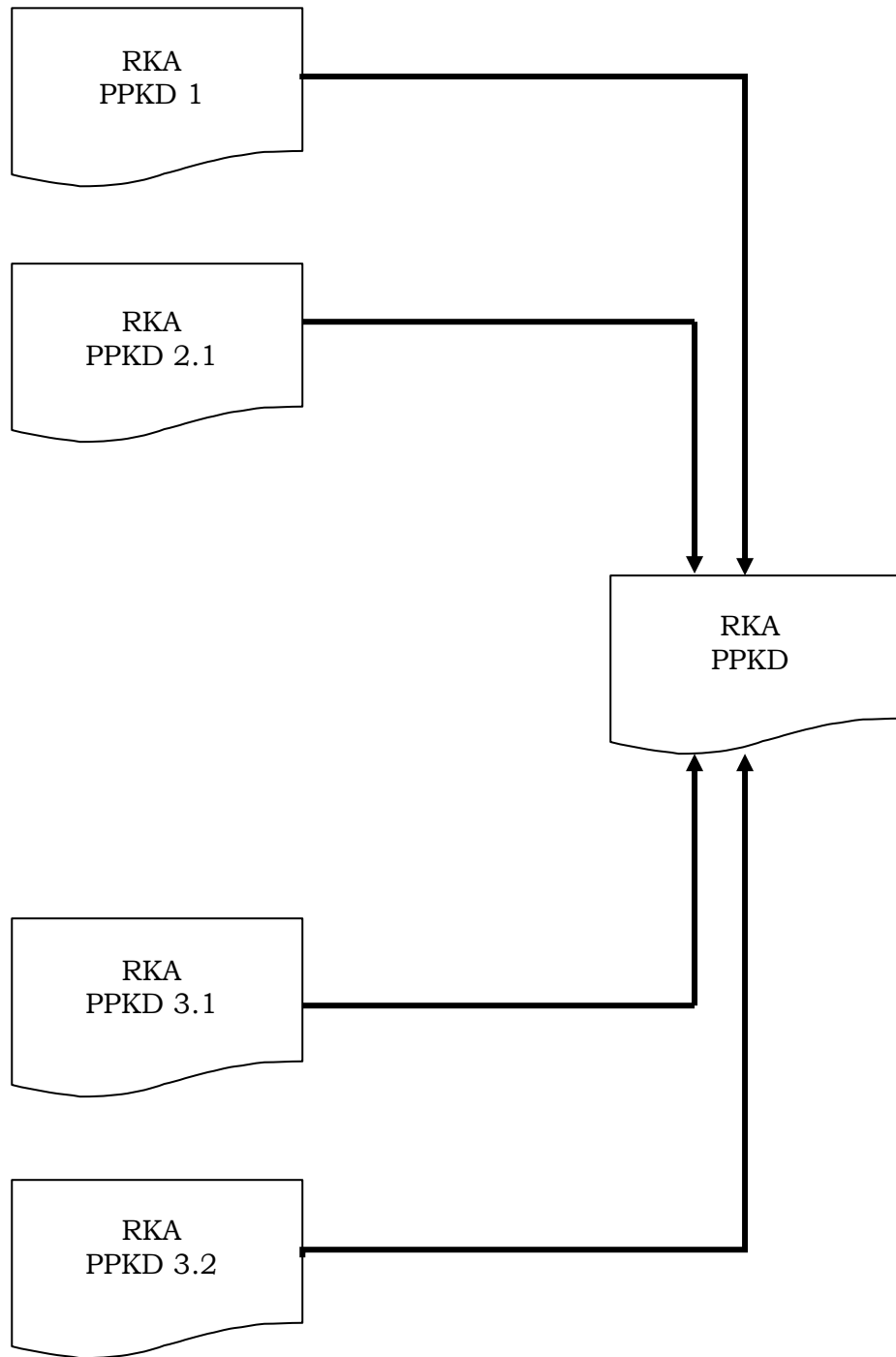
(nama lengkap)
WAKIL KETUA

N. BAGAN ALUR Pengerjaan RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

1. BAGAN ALUR Pengerjaan RKA-SKPD



2. BAGAN ALIR Pengerjaan RKA-PPKD



O. FORMAT RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

1. FORMAT RKA-SKPD

KABUPATEN BOYOLALI
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx.....
ORGANISASI : x.xx.xx

Pengguna Anggaran

a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

*) coret yang tidak perlu

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran					
Urusan Pemerintahan	x. xx.				
Organisasi	x. xx. xx.				
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp) 6=(3x5)
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga	
1	2	3	4	5	
Jumlah					
<p>....., tanggal.....</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD</p> <p style="text-align: right;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: right;"><u>(nama lengkap)</u></p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst...					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

c. FORMULIR RKA-SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA - SKPD
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan	:	x. xx.				
Organisasi	:	x. xx. xx.....				
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun N+1
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6=3x5	7
Jumlah						
.....tanggal..... Kepala SKPD (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst...						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1						
2						
dst						

d. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 2.2.1	
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan	: x. xx.					
Organisasi	: x. xx. xx.					
Program	: x. xx. xx. xx.					
Kegiatan	: x. xx. xx. xx. xx.					
Lokasi kegiatan	:					
Jumlah Tahun n-1	: Rp (.....)					
Jumlah Tahun n	: Rp (.....)					
Jumlah Tahun n+1	: Rp (.....)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			volume	Satuan	Harga satuan	
1		2	3	4	5	6=(3 x 5)
X	x	X	xx	xx		
X	x	X	xx	xx		
X	x	X	xx	xx		
X	x	X	xx	xx		
Jumlah						
....., tanggal.....						
Kepala SKPD						
(tanda tangan)						
(nama lengkap)						
NIP.						
Keterangan		:				
Tanggal Pembahasan		:				
Catatan Hasil Pembahasan		:				
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :						
No	Nama		NIP	Jabatan	Tandatangan	
1						
2						
Dst						

e. FORMULIR RKA-SKPD 2.2

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir RKA-SKPD 2.2	
KABUPATEN BOYOLALI Tahun Anggaran									
Urusan Pemerintahan : x.xx.									
Organisasi : x.xx.xx									
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
KODE		URAIAN	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	JUMLAH				
Program	Kegiatan				Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
xx		Program ...							
	xx	Kegiatan..							
	xx	Kegiatan..							
	xx	Dst							
xx		Program ...							
	xx	Kegiatan..							
	xx	Kegiatan..							
	xx	Dst							
xx		Program ...							
	xx	Kegiatan..							
	xx	Kegiatan..							
xx		Dst.....							
	xx	Dst....							
JUMLAH									
..... Tanggal Kepala SKPD (tanda tangan) (Nama lengkap) Nip.....									

2. FORMAT RKA-PPKD

KABUPATEN BOYOLALI
RENCANA KERJA ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKA - PPKD)

TAHUN ANGGARAN

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

a. Nama

.....

b. NIP

.....

c. Jabatan

.....

Kode	Nama Formulir
RKA - PPKD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - PPKD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

*) coret yang tidak perlu

a. FORMULIR RKA-PPKD

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Formulir RKA - PPKD
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran			
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2		3
<p>..... Tanggal</p> <p>PPKD</p> <p>(Tanda Tangan)</p> <p>(nama lengkap)</p> <p>Nip.</p>			

b. FORMULIR RKA-PPKD 1

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir RKA - PPKD 1					
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran ...										
Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah										
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)				
			volume	Satuan	Tarif/Harga					
1		2	3	4	5	6 = (3 x 5)				
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
X	x	x	xx	xx						
					Jumlah					
..... , tanggal PPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.										
Keterangan :										
Tanggal Pembahasan :										
Catatan Hasil Pembahasan :										
1. _____										
2. _____										
Dst										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:										
No	Nama				NIP	Jabatan	Tandatangan			
1										
2										
Dst										

b. FORMULIR RKA-PPKD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						Formulir RKA PPKD 2.1
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran ...						
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		volume	satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
Jumlah						
<p>.....,tanggal..... PPKD</p> <p>(tanda tangan)</p> <p><u>(nama lengkap)</u> NIP.</p>						
Keterangan : _____						
Tanggal : _____						
Pembahasan : _____						
Catatan Hasil : _____						
Pembahasan : _____						
1. _____						
2. _____						
Dst _____						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1						
2						
dst						

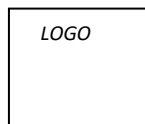
c. FORMULIR RKA-PPKD 3.1

Halaman.....

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				Formulir RKA - PPKD 3.1	
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran					
Rincian Penerimaan Pembiayaan					
Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)	
1		2		3	
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
x	x	xx	xx		
				Jumlah Penerimaan	
			, tanggal.....	
				PPKD	
				(tanda tangan)	
				(nama lengkap)	
				NIP.	
Keterangan _____ :					
Tanggal Pembahasan _____ :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan	
1					
2					
dst					

P. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD BESERTA LAMPIRAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 20xx
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal bulan tahun
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun 20xx tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Boyolali

DAN

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah	Rp.....
B. Belanja Daerah	Rp.....
Surplus/(Defisit)	Rp.....

3. Pembiayaan Daerah:

- a. Penerimaan Rp.....
- b. Pengeluaran Rp.....
- Pembiayaan Netto Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp.....

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - 1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.....
 - 2. Dana perimbangan sejumlah Rp.....
 - 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1. Pajak daerah sejumlah Rp.....
 - 2. Retribusi daerah sejumlah Rp.....
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1. Dana bagi hasil sejumlah Rp.....
 - 2. Dana alokasi umum sejumlah Rp.....
 - 3. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.....
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1. Hibah sejumlah Rp.....
 - 2. Dana darurat sejumlah Rp.....
 - 3. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.....
 - 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....
 - 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - 1. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
 - 2. Belanja Langsung sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja:
 - 1. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - 2. Belanja bunga sejumlah Rp.....
 - 3. Belanja subsidi sejumlah Rp.....
 - 4. Belanja hibah sejumlah Rp.....
 - 5. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.....
 - 6. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.....
 - 7. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.....
 - 8. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.....
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - 1. Belanja pegawai sejumlah Rp.....

2. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.....
3. Belanja modal sejumlah Rp.....

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 1. Penerimaan sejumlah Rp.....
 2. Pengeluaran sejumlah Rp.....
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.....
 2. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 4. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....
 6. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 1. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
 2. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....
 3. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....
 4. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran VII | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran VIII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |

- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BOYOLALI
(tanda tangan)
(nama lengkap)

**) Perda ini dinyatakan sah pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN NOMOR

2. RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan asli daerah	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1.2	Dana perimbangan	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan social	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	

2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	
		Jumlah Belanja
		Surplus/(Defisit)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
		Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
		Jumlah pengeluaran pembiayaan
		Pembiayaan neto
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KABUPATEN BOYOLALI
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				
1 01	Pendidikan				
1 01 01	Dinas Pendidikan				
1 01 03	Dst.....				
1 02	Kesehatan				
1 02 01	Dinas Kesehatan				
1 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah				
1 02 03	Dst.....				
1 03	Pekerjaan Umum				
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum				
1 03 02	Dst.....				
1 04	Perumahan				
1 04 01	Dinas Pekerjaan Umum				
1 04 02	Dst.....				
1 05	Penataan Ruang				
1 05 01	Dinas Pekerjaan Umum				
1 05 02	Dst.....				
1 06	Perencanaan Pembangunan				
1 06 01	BAPPEDA dan Penanaman Modal				
1 06 02	Dst.....				
1 07	Perhubungan				
1 07 01	Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi				
1 07 02	Dst.....				
1 08	Lingkungan Hidup				
1 08 01	BadanLingkungan Hidup				
1 08 02	Dst.....				
1 09	Pertanahan				
1 09 01	Sekretariat Daerah				
1 09 02	Dst.....				
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1 10 01	Dinas Kependudukan dan Caatatan Sipil				
1 10 02	Dst.....				
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1 11 01	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				
1 11 02	Dst.....				
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1 12 01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah				
1 12 02	Dst.....				
1 13	Sosial				
1 13 01	Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi				
1 13 02	Dst.....				

1	14		Tenaga Kerja				
1	14	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi				
1	14	02	Dst.....				
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1	15	02	Dst.....				
1	16		Penanaman Modal				
1	16	01	BAPPEDA dan Penanaman Modal				
1	16	02	Dst.....				
1	17		Kebudayaan				
1	17	01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				
1	17	02	Dst.....				
1	18		Pemuda dan Olah Raga				
1	18	01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				
1	18	02	Dst.....				
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1	19	01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
1	19	02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1	19	03	Dst.....				
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahn Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	20	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
1	20	02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah				
1	20	03	Sekretariat Daerah				
1	20	04	Sekretariat DPRD				
1	20	05	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1	20	06	Dinas Pendapatan Daerah				
1	20	07	Inspektorat				
1	20	08	Badan Kepegawaian Daerah				
1	20	09	Kecamatan Bunguran Timur				
1	20	10	Kecamatan Bunguran Barat				
1	20	11	Kecamatan Bunguran Utara				
1	20	12	Kecamatan Pulau Laut				
1	20	13	Kecamatan Midai				
1	20	14	Kecamatan Serasan				
1	20	15	Kecamatan Subi				
1	20	16	Kecamatan Pulau Tiga				
1	20	17	Kecamatan Bunguran Tengah				
1	20	18	Kecamatan Bunguran Timur Laut				
1	20	19	Kecamatan Bunguran Selatan				
1	20	20	Kecamatan Serasan Timur				
1	21		Ketahanan Pangan				
1	21	01	Dinas Pertanian				
1	21	02	Dst.....				
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	22	02	Dst.....				
1	23		Statistik				
1	23	01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
1	23	02	Dst.....				
1	24		Kearsipan				
1	24	01	Kantor Perustakaan dan Arsip Daerah				
1	24	02	Dst.....				
1	25		Komunikasi dan Informatika				
1	25	01	Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi				

1	25	02	Dst.....				
1	26		Perpustakaan				
1	26	01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah				
1	26	02	Dst.....				
2			URUSAN PILIHAN				
2	01		Pertanian				
2	01	01	Dinas Pertanian				
2	01	02	Dst.....				
2	02		Kehutanan				
2	02	01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan				
2	02	02	Dst.....				
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral				
2	03	01	Dinas Pertambangan dan Energi				
2	03	02	Dst.....				
2	04		Pariwisata				
2	04	01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				
2	04	02	Dst.....				
2	05		Kelautan dan Perikanan				
2	05	01	Dinas Kelautan dan Perikanan				
2	05	02	Dst.....				
2	06		Perdagangan				
2	06	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
2	06	02	Dst.....				
2	07		Industri				
2	07	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
2	07	02	Dst.....				
2	08		Ketransmigrasian				
2	03	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi				
2	08	02	Dst.....				
Jumlah							
SURPLUS/(DEFISIT)							

KODE	Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5=3-4	6
20	Otonomi Dearah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
XX	Sekretariat Daerah / BPKD				

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

4. REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BOYOLALI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
1					URUSAN WAJIB				
1	01				Pendidikan				
1	01	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	01	01	xx		Program				
1	01	01	xx	xx	Kegiatan				
1	01	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	01	02	xx		Program				
1	01	02	xx	xx	Kegiatan				
1	01	03			Dst.....				
1	02				Kesehatan				
1	02	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	02	01	xx		Program				
1	02	01	xx	xx	Kegiatan				
1	02	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	02	02	xx		Program				
1	02	02	xx	xx	Kegiatan				
1	02	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	02	03	xx		Program				
1	02	03	xx	xx	Kegiatan				
1	02	04			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	02	04	xx		Program				
1	02	04	xx	xx	Kegiatan				
1	02	05			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	02	05	xx		Program				
1	02	05	xx	xx	Kegiatan				
1	02	06			Dst.....				
1	03				Pekerjaan Umum				
1	03	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	03	01	xx		Program				
1	03	01	xx	xx	Kegiatan				
1	03	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	03	02	xx		Program				
1	03	02	xx	xx	Kegiatan				
1	03	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	03	03	xx		Program				
1	03	03	xx	xx	Kegiatan				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	03	04			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	03	04	xx		Program				
1	03	04	xx	xx	Kegiatan				
1	03	05			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	03	05	xx		Program				
1	03	05	xx	xx	Kegiatan				
1	03	06			Dst.....				
1	04				Perumahan				
1	04	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	04	01	xx		Program				
1	04	01	xx	xx	Kegiatan				
1	04	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	04	02	xx		Program				
1	04	02	xx	xx	Kegiatan				
1	04	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	04	03	xx		Program				
1	04	03	xx	xx	Kegiatan				
1	04	04			Dst.....				
1	05				Penataan Ruang				
1	05	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	05	01	xx		Program				
1	05	01	xx	xx	Kegiatan				
1	05	02			Dst.....				
1	06				Perencanaan Pembangunan				
1	06	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	06	01	xx		Program				
1	06	01	xx	xx	Kegiatan				
1	06	02			Dst.....				
1	07				Perhubungan				
1	07	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	07	01	xx		Program				
1	07	01	xx	xx	Kegiatan				
1	07	02			Dst.....				
1	08				Lingkungan Hidup				
1	08	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	08	01	xx		Program				
1	08	01	xx	xx	Kegiatan				
1	08	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	08	02	xx		Program				
1	08	02	xx	xx	Kegiatan				
1	08	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	08	03	xx		Program				
1	08	03	xx	xx	Kegiatan				
1	08	04			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	08	04	xx		Program				
1	08	04	xx	xx	Kegiatan				
1	08	05			Dst.....				
1	09				Pertanahan				
1	09	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	09	01	xx		Program				
1	09	01	xx	xx	Kegiatan				
1	09	02			Dst.....				
1	10				Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	10	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	10	01	xx		Program				
1	10	01	xx	xx	Kegiatan				
1	10	02			Dst.....				
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan				
1	11	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	11	01	xx		Program				
1	11	01	xx	xx	Kegiatan				
1	11	02			Dst.....				
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga				
1	12	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	12	01	xx		Program				
1	12	01	xx	xx	Kegiatan				
1	12	02			Dst.....				
1	13				Sosial				
1	13	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	13	01	xx		Program				
1	13	01	xx	xx	Kegiatan				
1	13	02			Dst.....				
1	14				Ketenagakerjaan				
1	14	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	14	01	xx		Program				
1	14	01	xx	xx	Kegiatan				
1	14	02			Dst.....				
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil				
1	15	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	15	01	xx		Program				
1	15	01	xx	xx	Kegiatan				
1	15	02			Dst.....				
1	16				Penanaman Modal				
1	16	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	16	01	xx		Program				
1	16	01	xx	xx	Kegiatan				
1	16	02			Dst.....				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	17				Kebudayaan				
1	17	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	17	01	xx		Program				
1	17	01	xx	xx	Kegiatan				
1	17	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	17	02	xx		Program				
1	17	02	xx	xx	Kegiatan				
1	17	03			Dst.....				
1	18				Kepemudaan dan Olah Raga				
1	18	01			Dinas Pemuda dan Olah Raga				
1	18	01	xx		Program				
1	18	01	xx	xx	Kegiatan				
1	18	02			Dst.....				
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam				
1	19	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	19	01	xx		Program				
1	19	01	xx	xx	Kegiatan				
1	19	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	19	02	xx		Program				
1	19	02	xx	xx	Kegiatan				
1	19	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	19	03	xx		Program				
1	19	03	xx	xx	Kegiatan				
1	19	04			Dst.....				
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan				
1	20	03			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	03	xx		Program				
1	20	03	xx	xx	Kegiatan				
1	20	04			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	04	xx		Program				
1	20	04	xx	xx	Kegiatan				
1	20	05			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	05	xx		Program				
1	20	05	xx	xx	Kegiatan				
1	20	06			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	06	xx		Program				
1	20	06	xx	xx	Kegiatan				
1	20	07			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	07	xx		Program				
1	20	07	xx	xx	Kegiatan				
1	20	08			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	08	xx		Program				
1	20	08	xx	xx	Kegiatan				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	20	09			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	09	xx		Program				
1	20	09	xx	xx	Kegiatan				
1	20	10			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	20	10	xx		Program				
1	20	10	xx	xx	Kegiatan				
1	20	11			Dst.....				
1	21				Ketahanan Pangan				
1	21	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	21	01	xx		Program				
1	21	01	xx	xx	Kegiatan				
1	21	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	21	02	xx		Program				
1	21	02	xx	xx	Kegiatan				
1	21	03			Dst.....				
1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan				
1	22	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	22	01	xx		Program				
1	22	01	xx	xx	Kegiatan				
1	22	02			Dst.....				
1	23				Statistik				
1	23	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	23	01	xx		Program				
1	23	01	xx	xx	Kegiatan				
1	23	03			Dst.....				
1	24				Kearsipan				
1	24	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	24	01	xx		Program				
1	24	01	xx	xx	Kegiatan				
1	24	02			Dst.....				
1	25				Komunikasi dan Informatika				
1	25	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	25	01	xx		Program				
1	25	01	xx	xx	Kegiatan				
1	25	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	25	02	xx		Program				
1	25	02	xx	xx	Kegiatan				
1	26				Perpustakaan				
1	26	02			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
1	26	02	xx		Program				
1	26	02	xx	xx	Kegiatan				
1	26	03			Dst.....				
2					URUSAN PILIHAN				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
2	01				Pertanian				
2	01	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	01	01	xx		Program				
2	01	01	xx	xx	Kegiatan				
2	01	02			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	01	02	xx		Program				
2	01	02	xx	xx	Kegiatan				
2	01	03			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	01	03	xx		Program				
2	01	03	xx	xx	Kegiatan				
2	01	04			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	01	04	xx		Program				
2	01	04	xx	xx	Kegiatan				
2	01	05			Dst.....				
2	02				Kehutanan				
2	02	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	02	01	xx		Program				
2	02	01	xx	xx	Kegiatan				
2	02	02			Dst.....				
2	03				Energi dan Sumberdaya Mineral				
2	03	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	03	01	xx		Program				
2	03	01	xx	xx	Kegiatan				
2	03	02			Dst.....				
2	04				Pariwisata				
2	04	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	04	01	xx		Program				
2	04	01	xx	xx	Kegiatan				
2	04	02			Dst.....				
2	05				Kelautan dan Perikanan				
2	05	01			Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	05	01	xx		Program				
2	05	01	xx	xx	Kegiatan				
2	05	02			Dst.....				
2	06				Perdagangan				
2	06	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	06	01	xx		Program				
2	06	01	xx	xx	Kegiatan				
2	06	02			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxxxx				
2	06	02	xx		Program				
2	06	02	xx	xx	Kegiatan				
2	06	03			Dst.....				
2	07				Industri				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5
2	07	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxx				
2	07	01	xx		Program				
2	07	01	xx	xx	Kegiatan				
2	07	02			Dst.....				
2	08				Ketransmigrasian				
2	08	01			Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxxx				
2	08	01	xx		Program				
2	08	01	xx	xx	Kegiatan				
2	08	02			Dst.....				
Jumlah									

5. RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BOYOLALI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx.
ORGANISASI : x. xx. xx.

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
x.xx	xx	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
x.xx	xx	00	00	4	1	Pendapatan asli daerah		
x.xx	xx	00	00	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	
x.xx	xx	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	
x.xx	xx	00	00	4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
x.xx	xx	00	00	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
x.xx	xx	00	00	4	2		Dana perimbangan	
x.xx	xx	00	00	4	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
x.xx	xx	00	00	4	2	2	Dana Alokasi Umum	
x.xx	xx	00	00	4	2	3	Dana Alokasi Khusus	
x.xx	xx	00	00	4	3		Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
x.xx	xx	00	00	4	3	1	Dana penyeimbang dari Pemerintah	
x.xx	xx	00	00	4	3	2	Dana darurat	
x.xx	xx	00	00	4	3	3	Pendapatan Hibah	
x.xx	xx	00	00	4	3	4	Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota *)	
x.xx	xx	00	00	4	3	5	Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota *)	
x.xx	xx	00	00	4	3	6	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya	
Jumlah Pendapatan								
x.xx	xx	00	00	5		BELANJA DAERAH		
						Belanja Tidak Langsung		
x.xx	xx	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	
x.xx	xx	00	00	5	1	2	Belanja Bunga	
x.xx	xx	00	00	5	1	3	Belanja Subsidi	
x.xx	xx	00	00	5	1	4	Belanja Hibah	
x.xx	xx	00	00	5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	
x.xx	xx	00	00	5	1	6	Belanja Belanja Bagi Hasil	
x.xx	xx	00	00	5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	
x.xx	xx	00	00	5	1	8	Belanja Tidak Terduga	
						Belanja Langsung		
x.xx	xx	xx				Program		
x.xx	xx	xx	xx			Kegiatan		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	1	Belanja pegawai	
x.xx	xx	xx	xx	5	2	2	Belanja barang dan jasa	
x.xx	xx	xx	xx	5	2	3	Belanja modal	
x.xx	xx	xx	xx			Kegiatan		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	1	Belanja pegawai	
x.xx	xx	xx	xx	5	2	2	Belanja barang dan jasa	

x.xx	xx	xx					Program		
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	1	Belanja pegawai		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	2	Belanja barang dan jasa		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	3	Belanja modal		
x.xx	xx	xx	xx				Kegiatan		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	1	Belanja pegawai		
x.xx	xx	xx	xx	5	2	2	Belanja barang dan jasa		
							dst		
Jumlah Belanja									
Surplus/(Defisit)									
x.xx	xx	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH		
x.xx	xx	00	00	6	01		Penerimaan pembiayaan		
x.xx	xx	00	00	6	01	1	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
x.xx	xx	00	00	6	01	2	Pencairan dana cadangan		
x.xx	xx	00	00	6	01	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
x.xx	xx	00	00	6	01	4	Penerimaan pinjaman daerah		
x.xx	xx	00	00	6	01	5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
x.xx	xx	00	00	6	01	6	Penerimaan piutang daerah		
Jumlah penerimaan pembiayaan									
x.xx	xx	00	00	6	02		Pengeluaran pembiayaan		
x.xx	xx	00	00	6	02	1	Pembentukan dana cadangan		
x.xx	xx	00	00	6	02	2	Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah		
x.xx	xx	00	00	6	02	3	Pembayaran pokok utang		
x.xx	xx	00	00	6	02	4	Pemberian pinjaman daerah		
Jumlah pengeluaran pembiayaan									
Pembiayaan neto									

.....tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

6. REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN BOYOLALI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20xx

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7		
01			Pelayanan umum						
01	1	06	Perencanaan Pembangunan						
01	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
01	1	21	Statistik						
01	1	23	Kearsipan						
01	1	24	Komunikasi dan Informatika						
01	1	25	Perencanaan Pembangunan						
02			Pertahanan						
03			Ketertiban dan keamanan						
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
04			Ekonomi						
04	1	07	Perhubungan						
04	1	14	Ketenagakerjaan						
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
04	1	16	Penanaman Modal						
04	1	21	Ketahanan Pangan						
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
04	2	01	Pertanian						
04	2	02	Kehutanan						
04	2	03	Energi dan Sumber daya Mineral						

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
04	2	05	Kelautan dan Perikanan						
04	2	06	Perdagangan						
04	2	07	Industri						
04	2	08	Ketransmigrasian						
05			Lingkungan hidup						
05	1	05	Penataan Ruang						
05	1	08	Lingkungan Hidup						
05	1	09	Pertanahan						
06			Perumahan						
06	1	03	Pekerjaan Umum						
06	1	04	Perumahan						
07			Kesehatan						
07	1	02	Kesehatan						
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
08			Pariwisata dan budaya						
08	1	17	Kebudayaan						
08	2	04	Pariwisata						
09			Agama						
10			Pendidikan						
10	1	01	Pendidikan						
10	1	18	Kepemudaan dan Olah Raga						
10	1	26	Perpustakaan						
11			Perlindungan sosial						
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan						

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
11	1	13	Sosial						

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

7. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

KABUPATEN BOYOLALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b								
Golongan IV/a								
JUMLAH GOLONGAN IV								
Golongan III/d								
Golongan III/c								
Golongan III/b								
Golongan III/a								
JUMLAH GOLONGAN III								
Golongan II/d								
Golongan II/c								
Golongan II/b								
Golongan II/a								
JUMLAH GOLONGAN II								
Golongan I/d								
Golongan I/c								
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOLONGAN I								
TOTAL								

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

9. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
D st												
	JUMLAH											

10. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx

(Dalam rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1					
2					
3					
4					
dst					
Jumlah					

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

11. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 20xx

(Dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					
	Jumlah				

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

12. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

a. TAHUN PERTAMA

KABUPATEN BOYOLALI
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN

No	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s/d Akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8

Boyolali,Tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

Tanda Tangan

Nama Lengkap

b. TAHUN KEDUA

KABUPATEN BOYOLALI
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
 YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
 DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN

No	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi s/d Akhir TA n-2	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi s/d Akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini (Rp) TA n	
			APBD INDUK TA n-2	Perubahan APBD TA n-2		APBD INDUK TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	4	5			7	8

Boyolali,Tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

Tanda Tangan

Nama Lengkap

13. DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
dst								
Jumlah								

Boyolali,Tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

Tanda Tangan

Nama Lengkap

14. DAFTAR PINJAMAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 20xx

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

Boyolali,Tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Q. FORMAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI BESERTA LAMPIRAN

1. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan PasalPeraturan Daerah Nomor..... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ..;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20xx;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor ... Tahun 20xx tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx terdiri atas :

- a. Pendapatan :
 - a.Pendapatan Asli Daerah Rp.
 - b.Dana Perimbangan Rp.
 - c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan Rp.
- b. Belanja :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - b. Belanja Pegawai Rp.
 - c. Belanja Bunga Rp.
 - d. Belanja Subsidi Rp.
 - e. Belanja Hibah Rp.
 - f. Belanja Bantuan Sosial Rp.
 - g. Belanja Bagi Hasil Rp.

h. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	
i. Belanja Tidak Terduga	Rp.	
		Rp.
j. Belanja Langsung		
k. Belanja Pegawai	Rp.	
l. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	
m. Belanja Modal	Rp.	
		Rp.
	Jumlah Belanja	Rp.
	Surplus/(Defisit)	Rp.
c. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	
b. Pengeluaran	Rp.	
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN NOMOR

2. RINGKASAN PENJABARAN APBD

KABUPATEN BOYOLALI RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan asli daerah	
1.1.1	Pajak daerah	
1.1.2	Retribusi daerah	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.2	Dana perimbangan	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Belanja bunga	
2.1.3	Belanja subsidi	
2.1.4	Belanja hibah	
2.1.5	Belanja bantuan social	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.3	Belanja modal	

		Jumlah Belanja
		Surplus/(Defisit)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
		Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
		Jumlah pengeluaran pembiayaan
		Pembiayaan netto
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	
*) Coret yang tidak perlu		

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

4. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Dst			

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

5. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
DST			

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

R. FORMAT SUSUNAN NOTA KEUANGAN

SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Umum;
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

Bab II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

- 2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
- 2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
- 2.3 Estimasi Pendapatan Daerah;
- 2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

Bab III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah;
- 3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah;
- 4.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- 4,4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

Bab IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

Bab V. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab VI. Penutup

S. FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA

Nomor :

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. (nama lengkap) : Bupati Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
 2. (nama lengkap) : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
 3. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
 4. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 20xx yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 20xx selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

BUPATI BOYOLALI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

T. FORMAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur/Bupati/Walikota *).... telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri/Gubernur *).... NomorTahuntentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota *)... Tahun Anggaran;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota *)..... Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang NomorTahuntentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran..... sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.....
2. Belanja Daerah	Rp.....
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp.....
b. Pengeluaran	Rp.....
Pembiayaan Netto	Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp.....

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.....
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp.....
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp.....
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp.....
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.....
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.....
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.....
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.....
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp.....
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.....
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.....
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
 - b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp.....
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp.....
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp.....
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.....
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.....
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.....
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.....
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.....

- b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.....
- c. Belanja Modal sejumlah Rp.....

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp.....
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.....
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.....
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - 1. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - 2. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....
 - 3. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....
 - 4. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota*).....
NomorTanggal

SEKRETARIS DAERAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN NOMOR

*) coret yang tidak perlu

**)

U. FORMAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN APBD

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor.....
Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boyolali
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahuntentang Pembentukan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)..... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran terdiri atas :

a. Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp.
2) Dana Perimbangan	Rp.
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.

b. Belanja

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja pegawai	Rp.
b) Belanja bunga	Rp.
c) Belanja subsidi	Rp.
d) Belanja hibah	Rp.
e) Belanja bantuan sosial	Rp.
f) Belanja bagi hasil	Rp.
g) Belanja bantuan keuangan	Rp.
h) Belanja tidak terduga	Rp.
	Rp.

2) Belanja Langsung

a) Belanja pegawai	Rp.
b) Belanja barang dan jasa	Rp.
c) Belanja modal	Rp.

	Jumlah Belanja	Rp.
		Rp.
	Surplus/(Defisit)	Rp.
3) Pembiayaan:		
a) Penerimaan		Rp.
b) Pengeluaran		Rp.
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.....
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.....

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*) dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

JADWAL PENYUSUNAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
A. APBD			
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah	Awal bulan Juni	1 bulan
3.	Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	3 minggu
4.	KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Minggu pertama bulan Juli	
5.	Penyusunan Rancangan PPAS		1 minggu
6.	Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD	Minggu kedua bulan Juli	3 minggu
7.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Akhir bulan Juli	
8.	Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah	Awal bulan Agustus	1 minggu
9.	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
10.	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)	
11.	Penetapan hasil evaluasi	15 hari kerja (pertengahan bulan Desember)	
12.	Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	7 hari kerja	Akhir bulan Desember
14.	Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi		7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur
15.	Penghentian dan pencautan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD	7 hari kerja	Awal bulan Januari
16.	Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi	3 hari kerja setelah keputusan ditetapkan	
17.	Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah	31 Desember	

	tentang penjabaran APBD		
18.	Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	7 hari kerja	
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD			
1.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang.	Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember)	
2.	Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Paling lama 30 hari kerja (pertengahan bulan Januari)	1 bulan
C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD			
1.	Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD	Pertengahan bulan Juni	
2.	Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu pertama bulan Juli	15 hari
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Minggu pertama bulan Agustus

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO